

**Analisis Determinan Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat**

**SKRIPSI**



Oleh :

Nama : Acep Kurniawan

Nomor Mahasiswa : 14313262

Program Studi : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA**

**2018**

**Analisis Determinan Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat**

**SKRIPSI**

disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir

guna memperoleh gelar Sarjana jenjang strata 1

Program Studi Ilmu Ekonomi,

Pada Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama : Acep Kurniawan

Nomor Mahasiswa : 14313262

Program Studi : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA**

**2018**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi FE UII. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka Saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 09 Mei 2018

Penulis,  
METERAI  
TEMAPEL  
F0FC5AEF846437092  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
Acep Kurniawan



## PENGESAHAN

Analisis Determinan Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat

Nama : Acep Kurniawan

Nomor Mahasiswa : 14313262

Program Studi : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 25 April 2018

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop on the left and a horizontal line extending to the right.

Awan Setya Dwanta Drs.,M.Ec.Dev.

**BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI**

SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISIS DETERMINAN KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2011-2016**

Disusun Oleh : **ACEP KURNIAWAN**

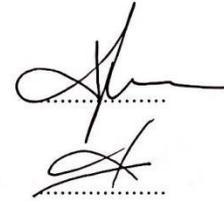
Nomor Mahasiswa : **14313262**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Rabu, tanggal: 6 Juni 2018

Penguji/ Pembimbing Skripsi : **Awan Setya Dewanta, Drs.,M.Ec.Dev.**

Penguji : **Abdul Hakim, SE, M.Ec., Ph.D.**



Two handwritten signatures in black ink, one above the other, positioned to the right of the examiner names. Each signature is written over a horizontal dotted line.

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia



Df. D: Agus Harjito, M.Si.

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

- ❖ *Kedua orang tua Bapak dan Ibu yang telah memberikan dukungan penuh serta doa yang terus dipanjatkan, hingga sampai pada titik ini*
- ❖ *Ketiga saudara kandungku Kakak-kakakku yang selalu menemani suka dan duka Sefti Syaputri, Leny Dwi Jayanti, dan Yuliani.*
- ❖ *Dan untuk, masa depanku*

## MOTTO

- ❖ Karena jika dalam hidupmu semuanya sempurna, kamu tidak akan pernah belajar dan tidak akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih dan karenanya Allah selalu ada dalam setiap keadaan
- ❖ Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan (5). Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan) (6), tetaplah bekerja keras untuk (urusan yang lain) (7), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap (8). (Q.S. Al Insyirah)

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menjalankan ibadah, khususnya mencari ilmu. Atas karuniadan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ANALISIS DETERMINAN KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA BARAT”.

Skripsi ini diajukan sebagai syarat dalam menempuh gelar Sarjana Strata-1 Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Dalam penelitian skripsi ini, segala upaya telah penulis lakukan demi tercapainya kesempurnaan tulisan ini. Penulis banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak, oleh karenanya penulis mengucapkan banyak terimakasih, khususnya kepada:

1. Allah SWT atas segala sesuatu yang telah diberikan kepada penulis.
2. Bapak Dr. H. Agus Harjito, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Awan Setya Dewanta Drs.,M.Ec.Dev. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, semangat, serta sabar dalam melakukan bimbingan hingga pada tahap akhir skripsi.
4. Bapak dan Ibu yang selalu mendoakan untuk kebaikan putrinya, memberikan dukungan penuh, serta cinta kasih sayang yang tak lekang oleh waktu.

5. Saudara kandungku Kakakku-Kakakku Sefti, Leny, dan Yuliani yang selalu menemani dan menyemangati dalam keadaan senang maupun sedih.
6. Seseorang yang telah sangat sabar menghadapi sifat-sifat aku, pelengkap dalam kurang dan lebih, selalu menyemangati agar terus menjadi pribadi yang lebih baik , dan selalu membantu dalam hal apapun hingga skripsi ini selesai, ia adalah Tia Sandra Nur Puspita. Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan dan hal terindah untukmu.
7. Sahabatku-sahabatku Bang Andika, Bang Yomi, dan Bang Jati dan sahabat-sahabat SMA yang sampai sekarang selalu ada, Dendy, Doval dan Hanafi, dan yang senantiasa menemani dalam keadaan apapun, selalu sabar, pendengar setia dalam keluh kesahku, dan menjadikan aku pribadi yang lebih baik
8. Teman-teman terdekatku dikampus Sylvia Yamin, Iqbal Hizbullah, Yudha Wibowo, Dimas Mirza, Aziz Ikbar dan Dwi Achtiary yang selalu memberikan semangat dan hiburan canda tawa, terima kasih telah memberikan kenangan yang indah setiap kuliah.
9. Teman serta keluarga IE'14, bimbingan Bapak Awan, dan KKN UII unit 183, terima kasih telah banyak memberikan pembelajaran. Semoga teman-teman bisa mencapai cita-cita dan keinginan masing-masing, serta sukses di masa depan.

10. Keluarga besar yang telah memperlancar proses pengerjaan skripsi penulis.

11. Bagi semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga dengan terselesainya karya skripsi ini dapat menjadi bahan pembelajaran dan referensi bagi semua pihak, baik bagi penulis, pembaca, universitas, perusahaan, maupun masyarakat luas. Terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 19 April 2018

Penulis,

AcepKurniawan

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan .....	i
Halaman Judul .....	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme .....	iii
Halaman Pengesahan Skripsi .....	iv
Halaman Pengesahan Ujian .....	v
Halaman Persembahan .....	vi
Halaman Motto .....	vii
Halaman Kata Pengantar .....	viii
Halaman Daftar Isi .....	xi
Halaman Daftar Tabel .....	xiv
Halaman Daftar Grafik .....	xv
Halaman Daftar Gambar .....	xvi
Halaman Daftar Lampiran .....	xvii
Halaman Abstrak .....	xviii

## BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	9

## BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka .....	12
2.2 Landasan Teori .....	19
2.2.1 Kemiskinan.....	19
2.2.2 Indeks Pembangunan Manusia .....	22
2.2.3 Pengangguran .....	24
2.2.4 Upah Minimum .....	27
2.3 Hubungan antar Variabel .....	29
2.4 Hipotesis .....	32

## BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Cara Pengumpulan Data .....	33
3.2 Definisi Operasional Variabel .....	34

3.2.1 Variabel Dependen .....	34
3.2.2 Variabel Independen .....	34
3.3 Metode Analisis .....	35
3.3 Estimasi Model Regresi Data Panel .....	36
 BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
4.1 Deskripsi Data .....	48
4.2 Hasil dan Analisis Data .....	49
4.2.1 Pemilihan Model .....	49
4.2.1.1 Uji Chow .....	49
4.2.1.2 Uji Hausman.....	50
4.2.2 Model Regresi Panel <i>Fixed Effect</i> .....	51
4.2.3 Pengujian Hipotesis .....	53
4.2.3.1 R <sup>2</sup> Koefisien Determinasi.....	53
4.2.3.2 Uji F .....	53
4.2.3.3 Uji t .....	54
4.3 Interpretasi Hasil Persamaan Regresi .....	56

4.4 Pembahasan .....	57
----------------------	----

## BAB V SIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Simpulan .....	61
--------------------	----

5.2 Implikasi .....	61
---------------------	----

## DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Persentase Penduduk Miskin di Pulau Jawa .....	3
1.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat .....	4
1.3 Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, dan Upah Minimum di Provinsi Jawa Barat .....	5
4.1 Laju Pertumbuhan Penduduk (%) Migrasi dan Kelahiran di 5 Kabupaten Provinsi Jawa Barat .....	46
4.2 Statistik Deskriptif .....	49
4.3 Model <i>Fixed Effect</i> .....	51

## DAFTAR GRAFIK

Grafik	Halaman
4.1 Hasil Konstanta Berdasarkan Estimasi <i>iFixed Effect</i> .....	56

## DAFTAR GAMBAR

Gambar

Halaman

2.1 Kerangka Pikir .....	31
4.1 Peta Provinsi Jawa Barat dan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2016 .....	43

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
I. Data Variabel Independen dan Variabel Dependen .....	64
II. Rata-Rata Kabupaten atau Kota Provinsi Jawa Barat .....	69
III. INTERCEPT.....	70
IV. Hasil Common Effect .....	71
V. Hasil Fixed Effect .....	72
VI. Hasil Random Effect .....	74
VII. Hasil Uji Chow .....	76
VIII. Hasil Uji Hausman.....	77

## ABSTRAK

Skripsi ini memiliki judul “*Analisis Determinan Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat*”, sedangkan tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia, pengangguran, dan upah minimum. Jenis penelitiannya bersifat kuantitatif yaitu mengambil data sekunder melalui Badan Pusat Statistik (BPS) wilayah Jawa Barat dengan data *time-series* yaitu tahun 2011-2016, sedangkan data yang diambil adalah indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, dan Upah Minimum dari berbagai Kota dan Kabupaten. Kemudian untuk metode pengolahan data serta analisisnya menggunakan metode regresi data panel yang dibantu oleh program *EViews 8*. Dalam penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu tingkat kemiskinan dan variabel independen yang terdiri dari IPM, pengangguran, dan upah minimum. Model hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemiskinan, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka dan Upah Minimum berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.

Kata Kunci : Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, Upah Minimum.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang selalu menjadi pembicaraan khusus diberbagai Negara terutama di Negara yang sedang berkembang. Di Indonesia kemiskinan terjadi tidak hanya beberapa tahun saja, tetapi kemiskinan terjadi di Iindonesia sejak Negara Indonesia berdiri kemiskinan sudah ada. Masalah kemiskinan yang berkelanjutan akan berakibat pada suatu masalah yang kompleks. Contohnya, kemiskinan dapat berpengaruh dengan masalah kesehatan, pendidikan, kriminalitas dan masih banyak lagi.

Kemiskinan telah memangkas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan hak sebagai manusia yang berhak mendapatkan semua kebutuhan hidup seperti sandang, pangan dan papan, bahkan pemerintah cenderung mengabaikan aspirasi masyarakat miskin. Persoalan kemiskinan mempunyai banyak dimensi seperti dimensi ekonomi dan sosial. Dimensi ekonomi berhubungan dengan pendapatan perkapitalmasyarakat dan perekonomian disuatu Negara, sedangkan dimensi sosial berhubungan dengan perbedaan antar masyarakat antara orang kaya dan orang miskin.

Istilah kemiskinan muncul ketika masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan tidak dapat mencapai standar hidup tertentu. Menurut Badan Pusat Statistik (2010), kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan. Ada beberapa jenis kemiskinan yaitu kemiskinan struktural dan kultural. Kemiskinan struktural terjadi karena struktur yang membuat sebagian masyarakat tertentu yang mendominasi sarana ekonomi, sosial, politik dan budaya (Lubis, 1986). Sedangkan kemiskinan kultural disebabkan oleh perilaku masyarakat itu sendiri seperti, perilaku hidup yang boros, kurangnya keterampilan bekerja, dan tidak memiliki tabungan, serta memiliki sikap pasrah kepada lingkungan kemiskinan. Di Indonesia sendiri tingkat kemiskinan tidaklah sedikit yang disebabkan oleh perilaku hidup masyarakatnya, sehingga hal ini menyebabkan tingkat penduduk miskin setiap tahunnya meningkat. Di Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah yang tingkat kemiskinannya tinggi.

Pembangunan ekonomi yang terpusat di Pulau Jawa, tidak lepas dari masalah kemiskinan. Dari data Badan Pusat Statistik, masalah kemiskinan di Indonesia terletak pada pulau Jawa, terutama di Provinsi DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan selama ini pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa hanya dirasakan oleh golongan masyarakat tertentu dan tidak merata ke semua masyarakat.

**Tabel 1.1**  
**Persentase Penduduk Miskin**  
**di Pulau Jawa Tahun 2011 - 2016**

<b>Provinsi</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Rata-Rata</b>
DKI Jakarta	3,75	3,70	3,72	4,09	3,61	3,75	3,77
<b>Jawa Barat</b>	<b>10,65</b>	<b>9,89</b>	<b>9,61</b>	<b>9,18</b>	<b>9,57</b>	<b>8,77</b>	<b>9,61</b>
Jawa Tengah	15,76	14,98	14,44	13,58	13,32	13,19	14,21
DI Yogyakarta	16,08	15,88	15,03	14,55	13,16	13,10	14,63
Jawa Timur	14,23	13,08	12,73	12,28	12,28	11,85	12,74
Banten	6,32	5,71	5,89	5,51	5,75	5,36	5,75

Sumber: (Badan Pusat Statistik) Tahun 2018, Diolah

Tabel 1.1 menunjukkan persentase penduduk miskin di Pulau Jawa tahun 2011-2016. Secara umum dilihat dari tahun 2011 sampai 2016 persentase penduduk miskin di Pulau Jawa mengalami penurunan disetiap tahunnya. Rata-rata penduduk miskin tertinggi terdapat di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 14,63 persen, dan penduduk miskin terendah terdapat di Provinsi DKI Jakarta sebesar 3,77 persen. Rata-rata penduduk miskin di Jawa Barat 9,61 persen, yang merupakan terbesar keempat setelah Provinsi DI Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Menurut BPS rata-rata jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat sebesar 4.392,55 ribu jiwa dengan rata-rata persentase penduduk miskin sebesar 9,62 persen. Berikut data jumlah dan persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2016:

**Tabel 1.2**  
**Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin**  
**di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2016**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk
	(Ribu Jiwa)	Miskin (%)
2011	4.650,9	10,57
2012	4.430,2	9,88
2013	4.375,2	9,61
2014	4.239,0	9,18
2015	4.435,70	9,53
2016	4.224,32	8,95

Sumber: (Badan Pusat Statistik) Tahun 2017, Diolah

Keberhasilan dari upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Barat memperlihatkan pengaruh positif. Hal ini dapat dilihat dari tabel 1.2 jumlah penduduk miskin maupun persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat secara umum mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2011 persentase penduduk miskin sebesar 10,57 menurun menjadi 9,88 tahun 2012, tahun 2013 menurun menjadi 9,61 dan mengalami penurunan tahun 2014 sebesar 9,18 dan tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi 9,53 persen dan mengalami penurunan lagi tahun 2016

menjadi 8,95 persen. Penurunan kemiskinan tersebut mungkin disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain adalah : Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Upah Minimum

**Tabel 1.3**  
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pengangguran, dan Upah Minimum di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 - 2016**

<b>Tahun</b>	<b>Indeks Pembangunan Manusia</b>	<b>Pengangguran</b>	<b>Upah Minimum Provinsi</b>
	<b>(%)</b>	<b>(%)</b>	<b>(Rupiah)</b>
2011	66,67	9,83	732.000
2012	67,32	9,08	780.000
2013	68,25	9,16	850.000
2014	68,80	8,45	1000.000
2015	69,50	8,72	1000.000
2016	69,50	8,89	1.300.000

Sumber: (Badan Pusat Statistik) Tahun 2017, Diolah

Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan indeks yang komposisi didasarkan pada tiga indikator yaitu kesehatan, pendidikan dan standar hidup manusia (Hakim, 2002). Indeks pembangunan manusia salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, jika semua masyarakat

memiliki sumber daya manusia yang berkualitas maka akan mengurangi tingkat kemiskinan di setiap daerah di Indonesia, terutama Jawa Barat. Indeks pembangunan manusia yang berkualitas dapat dicapai jika masyarakatnya berkualitas dan memiliki bekal pendidikan dan kesehatan melalui peningkatan ilmu keterampilan. Berdasarkan BPS pada tabel 1.3 pada tahun 2011 sampai 2016 indeks pembangunan manusia menunjukkan pengaruh positif. Hal ini dapat dilihat dari indeks pembangunan manusia (IPM) yang terus mengalami kenaikan disetiap tahunnya. Pada tahun 2011 indeks pembangunan manusia sebesar 66,67 persen mengalami kenaikan ditahun 2012 menjadi 67,32 persen dan ditahun 2013 naik menjadi 68,25 persen, ditahun 2014 mengalami kenaikan lagi sebesar 68,80 persen serta tahun 2015 mengalami kenaikan lagi menjadi 69,50 persen dan ditahun 2016 sama seperti ditahun 2015 sebesar 69,50 persen.

Tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Barat mengalami naik turun disetiap tahunnya. Dapat dilihat dari tabel 1.3 tingkat pengangguran ditahun 2011 sebesar 9,83 persen dan mengalami penurunan ditahun 2012 menjadi 9,08 persen, dan ditahun 2013 mengalami kenaikan yang tidak terlalu besar menjadi 9,16 persen dan ditahun 2014 mengalami penurunan menjadi 8,45 persen dan 2015 mengalami kenaikan yang tidak terlalu tinggi sebesar 8,72 persen dan di 2016 mengalami kenaikan yang tidak terlalu besar menjadi 8,89 persen.

Faktor lain yang mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah upah minimum, Kondisi upah minimum disetiap daerah di Jawa Barat berbeda beda disetiap

kabupaten atau kotanya. Upah minimum yang sangat rendah dapat mengakibatkan peningkatan tingkat kemiskinan. Berdasarkan data dari BPS dalam tabel 1.3 upah minimum Provinsi Jawa Barat pada tahun 2011 sebesar 732.000 rupiah dan mengalami peningkatan ditahun 2012 sebesar 780.000, dan ditahun 2013 mengalami peningkatan lagi sebesar 850.000 rupiah dan meningkat lagi ditahun 2014 sebesar 1000.000 rupiah dan ditahun 2015 tidak mengalami peningkatan masih sama dengan tahun 2014 sebesar 1000.000 dan ditahun 2016 mengalami peningkatan lagi sebesar 1.300.000 rupiah. Meskipun rata-rata disetiap tahunnya upah minimum meningkat namun kenyataannya hal ini tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.

Upaya penanggulangan di Provinsi Jawa Barat dilaksanakan melalui lima kebijakan yaitu: Pertama pengangguran kemiskinan dapat dilakukan secara sistemik, serentak dan bersinergi banyak pihak dengan dukungan lintas pemerintah. Kedua perlunya upaya pendampingan kepada masyarakat miskin dalam memberikan pemahaman untuk lepas dari kemiskinan. Ketiga perlunya kesepakatan dari kepala OPD/Biro (Organisasi Perangkat Daerah) harus berorientasi pada pengangguran kemiskinan. Keempat pengangguran kemiskinan melalui bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, pendampingan kemandirian, pengembangan usaha produktif mandiri, serta program lain CSR/TJSL (Corporate Social Responsibility/Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) dengan kemitraan bersama masyarakat. Kelima Jawa Barat sebagai alat kendali penanggulangan kemiskinan berbasis individu dengan data

spasial dan a-spasial, untuk mempermudah pencarian data perindividu (Bapeda Jabar, 2014).

Maka, peneliti tertarik untuk meneliti Provinsi Jawa Barat yang memiliki tingkat kemiskinan relatif rendah dibandingkan daerah lain. Mengapa kemiskinan di Jawa Barat Rendah? Faktor IPM, TPT atau Upah Minimum yang menyebabkan kemiskinan rendah di Provinsi Jawa Barat. Mengembangkan faktor yang diyakini mampu mempengaruhi tingkat kemiskinan yang meliputi, indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan upah minimum Kabupaten atau Kota. Sehingga judul penelitian yang diambil oleh peneliti adalah **“Analisis Determinan Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat ”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat?
2. Apakah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat?

3. Apakah Upah Minimum Kabupaten atau Kota (UMK) berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembahasan determinan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat
2. Untuk menganalisis pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Barat
3. Untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum Kabupaten atau Kota (UMK) di Provinsi Jawa Barat

Adapun manfaat bagi penelitian ini adalah:

1. Pengembangan Ilmu

Penelitian ini merupakan syarat yang wajib bagi penulis dalam menyelesaikan studi, maka penulis membuat penelitian ini dan hasilnya diharapkan mampu menambah atau memberi informasi dalam wawasan dari berbagai pihak terkait kemiskinan yang ada di Provinsi Jawa Barat.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan didalam skripsi ini, disusun sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, dan sistematika penulisan

##### **BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi gambaran hasil dari penelitian sebelumnya dan penjelasan perbedaan dari penelitian sebelumnya serta menjelaskan kekurangan dan kelebihanannya. Landasan teori yang membahas permasalahan yang sudah ada dalam penelitian dan menjelaskan hubungan antar variabel.

##### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan cara dan jenis pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

#### **BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memperlihatkan data penelitian dan menyajikan hasil analisis serta pembahasannya.

#### **BAB V SIMPULAN DAN IMPLIKASI**

Bab ini berisi beberapa kesimpulan dari hasil penelitian dan implikasinya terhadap fenomena yang diteliti.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

Bab ini akan membahas beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Tujuan dari peneliti-peneliti terdahulu adalah sebagai referensi dalam penelitian dan memperkuat hasil analisis, adapun beberapa penelitian-penelitian tersebut yaitu:

Pratama (2014) membahas beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2012, kemudian melihat apakah ada perbedaan tingkat kemiskinan antar Provinsi dengan mengambil satu Provinsi sebagai basis perbandingan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan, pendapatan perkapita, konsumsi, tingkat inflasi dan indeks pembangunan manusia. Metode penelitian ini menggunakan metode analisis berganda. Berdasarkan hasil penelitian yang memperlihatkan adanya pengaruh secara berkesinambungan atau simultan variabel tingkat pendidikan, pendapatan perkapita, konsumsi, tingkat inflasi dan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan dengan koefisien determinan 0,56 (*R-Square*). Variabel konsumsi, pendapatan perkapita, tingkat inflasi dan indeks pembangunan manusia berhubungan negatif terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan.

Zuhdiyati (2017) membahas beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2011-2015. Adapun beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Alat analisis menggunakan regresi dan data panel. Berdasarkan hasil yang diteliti ditemukan bahwa secara bersamaan variabel pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan dengan koefisien determinan 0.968 (*R-Square*). Variabel tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

Susanti (2013) meneliti mengenai pengangguran, indeks pembangunan manusia dan pengaruh PDRB terhadap pengaruh kemiskinan di Jawa Barat. PDRB secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Barat. Pengangguran secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Barat.

Amalia (2012) meneliti mengenai pengaruh pendidikan, pengangguran dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia dari tahun 2001-2010 yang membuktikan bahwa variabel pengangguran dan inflasi memiliki

pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan variabel pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Astrini (2013) meneliti tentang pengaruh pendidikan, pengangguran dan PDRB terhadap kemiskinan di Provinsi Bali. Secara parsial pertumbuhan PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan angka melek huruf secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Dan selanjutnya tingkat pengangguran terbuka (TPT) berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali.

Dores (2014) menggunakan data sekunder 19 kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Barat yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat. Data diolah menggunakan SPSS dengan menggunakan alat analisis Regresi Linear Berganda untuk melihat pengaruh angka melek huruf dan angka harapan hidup terhadap jumlah penduduk miskin.

Wahyudi (2013) dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2007-2010. Variabel dependen adalah tingkat kemiskinan dan variabel independen meliputi kesehatan, pendidikan, pengeluaran pemerintah, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Metode analisis penelitian ini adalah regresi data panel dengan pendekatan model *fixed effect*. Pengolahan data dilakukan dengan *bantuan Eviews 6*. Menurut hasil analisis ditemukan bahwa variabel pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran

pemerintah berpengaruh signifikan dan negative terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan, variabel pengangguran berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat kemiskinan dan variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh positif secara statistik mempengaruhi tingkat kemiskinan.

Puspita (2015) menganalisis mengenai determinan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah 2008-2012. Variabel terikat adalah tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran, PDRB, dan jumlah penduduk serta angka melek huruf sebagai variabel bebas. Metode analisis adalah regresi data panel dengan model *Random Effect*. Berdasarkan penelitian tersebut variabel pengangguran, PDRB, dan jumlah penduduk signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan variabel angka melek huruf tidak signifikan terhadap kemiskinan. Variabel pengangguran dan jumlah penduduk mempunyai pengaruh positif terhadap kemiskinan, sedangkan variabel PDRB mempunyai pengaruh negative terhadap kemiskinan.

Fahmi (2015) menganalisis mengenai faktor pendidikan dan kesehatan berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pendidikan (RLS) dan kesehatan secara simultan berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi. Secara parsial, variabel kesehatan berpengaruh signifikan sedangkan pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi.

Mustika (2011) menganalisis menggunakan metode analisis kuantitatif regresi linier berganda dengan jumlah penduduk miskin sebagai variabel terikat dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel bebas. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel PDB dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan dan kedua variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen yaitu tingkat kemiskinan.

Wirawan (2015) menganalisis tentang pengaruh pendidikan, PDRB per kapita dan tingkat pengangguran terhadap jumlah masyarakat miskin di Provinsi Bali. Yang menunjukkan bahwa pendidikan, PDRB perkapita dan tingkat pengangguran secara bersamaan menunjukkan pengaruh signifikan terhadap jumlah masyarakat miskin. Pendidikan dan PDRB per kapita berpengaruh negatif dan signifikan secara parsial terhadap penduduk miskin. Sedangkan tingkat pengangguran berpengaruh positif secara parsial terhadap kemiskinan.

Nirwana (2013) meneliti tentang pengaruh variabel pendidikan terhadap presentase penduduk miskin di Indonesia yang melakukan studi mencakup 33 Provinsi, 6 Provinsi di pulau Jawa dan 27 Provinsi diluar pulau Jawa pada tahun 2006-2011 yang menunjukkan bahwa variabel pendidikan yang dibuat dalam angka. Keterkaitan sekolah terhadap pengaruh presentase penduduk miskin karena penduduk yang ingin menjalani aktivitas formal memerlukan biaya. Bagi masyarakat yang berasal dari kalangan tidak mampu biaya menjadi salah satu faktor yang menghambat kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Yacoup (2012) meneliti mengenai pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan. Dilakukan di Kabupaten atau Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Tingkat pengangguran berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat yang menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan.

Sukmaraga (2011) meneliti tentang seberapa besar pengaruh Indeks pembangunan manusia, PDRB per kapita dan jumlah pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah tahun 2008. Variabel IPM dan PDRB menunjukkan hasil yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Variabel jumlah pengangguran menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah.

Suliswanto (2010) meneliti pengaruh indeks pembangunan manusia dan PDRB terhadap jumlah kemiskinan di Indonesia. Variabel PDRB memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan variabel indeks pembangunan manusia lebih dominan dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Yang artinya variabel PDRB tidak begitu berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terdahulu dan beberapa hasil yang diperoleh dari berbagai studi kasus, maka penulis ingin menganalisis determinan kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. Terdapat beberapa kesamaan dengan penelitian yang sudah dilakukan terdahulu yaitu persamaan variabel dalam penelitian

serta penggunaan model dalam menganalisis data. Selain itu, terdapat perbedaan seperti periode waktu penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu.

Persamaan penelitian ditemukan pada penggunaan variabel dependen yaitu tingkat kemiskinan dan variabel independen yang terdiri dari indeks pembangunan manusia dan tingkat pengangguran terbuka. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diambil dari BPS dan menggunakan alat analisis regresi data panel. Variabel IPM memiliki koefisien bernilai negatif (Zuhdiyaty, 2017). Perbedaan dalam penelitian ini terdapat dalam periode waktu yaitu 2011-2015 sedangkan penelitian sekarang menggunakan periode waktu 2011-2016, lokasi penelitian sebelumnya di seluruh Indonesia sedangkan penelitian sekarang terdapat di Provinsi Jawa Barat, dan terdapat perbedaan variabel independen dengan penelitian sebelumnya yaitu pertumbuhan ekonomi, sedangkan penelitian sekarang menggunakan variabel independen upah minimum.

Persamaan penelitian selanjutnya ditemukan pada lokasi penelitian berada di Provinsi Jawa Barat dan persamaan ada pada penggunaan variabel independen yaitu pengangguran dan IPM dan kemiskinan menjadi variabel dependen. Pengangguran memiliki nilai koefisien positif dan IPM memiliki nilai koefisien negatif (Susanti, 2013). Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan sekarang ada pada variabel independen peneliti menggunakan upah minimum sebagai sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan variabel independen PDRB. Periode

waktu penelitian sebelumnya 2001-2010, sedangkan penelitian sekarang menggunakan 2011-2016.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Kemiskinan**

Kemiskinan adalah salah satu kondisi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi standar hidup secara ekonomi masyarakat disuatu daerah. Fenomena ini biasa terjadi karena rendahnya pendapatan masyarakat untuk mencukupi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM). Rendahnya penghasilan akan menyebabkan kurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup seperti standar kesehatan dan pendidikan. Masalah kemiskinan sangat sering terjadi di beberapa Negara yang sedang berkembang dengan tingkat penduduk yang tinggi sehingga terjadi ketidakmeratanya kesejahteraan masyarakat yang dapat menyebabkan ketimpangan sosial antar masyarakat.

Penduduk miskin tidak hanya hidup dengan kekurangan uang atau tingkat pendapatan yang rendah, melainkan tingkat kesehatan dan pendidikan yang rendah, mendapatkan perlakuan ketidakadilan dalam hukum dan rentan terhadap timbulnya ancaman tindak kriminal (Suryati, 2005).

Kemiskinan dapat dibagi menjadi empat kategori, antarlain:

1. Kemiskinan *Absolute*

Kondisi miskin *absolut* adalah dimana seseorang memiliki pendapatan yang dibawah rata-rata garis kemiskinan atau tidak mempunya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan yang sangat dibutuhkan.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang disebabkan oleh pengaruh kebijakan pembangunan yang tidak merata sehingga terjadi ketimpangan pada pendapatan.

3. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh persoalan sikap individu atau masyarakatan yang disebabkan karena faktor budaya, seperti tidak mau mencoba memperbaiki tingkat kehidupan, sifat malas, dan boros serta tidak memiliki kemampuan individu untuk berkeaktifitas meskipun dapat bantuan dari pihak lain.

4. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah kondisi kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya sumberdaya didalam sistem sosial budaya dan politik yang tidak mendukung penurunan tingkat kemiskinan, sering kali menyebabkan meningkatnya tingkat kemiskinan.

Kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua faktor, yaitu:

- a. Kemiskinan Alamiyah adalah kemiskinan yang sering dikaitkan dengan rendahnya sumber daya alam dan sarana umum, serta keadaan tanah yang tidak mendukung atau tandus.
- b. Kemiskinan Buatan adalah kemiskinan yang dikarenakan oleh pembangunan modrenisasi yang mengakibatkan masyarakat tidak mampu mengikuti ataupun menguasai sumber daya yang sudah disediakan, serta fasilitas ekonomi yang sudah disediakan secara menyeluruh.

Ukuran kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2010), masyarakat miskin merupakan penduduk yang mempunyai pengeluaran dibawah rata-rata garis kemiskinan. Penentuan garis kemiskinan dapat dihitung dari pendapatan masyarakat yang dibawah 7.057 rupiah perhari atau perorangan. Penentuan perhitungan 7.057 rupiah perhari berasal dari rata-rata kemiskinan berupa makanan dan non makanan. Jumlah konsumsi rupiah berupa makanan yang menjadi acuan dalam menghitung tingkat kemiskinan berdasarkan makanan yaitu 2100 kalori perhari perorang. Prtokan 2100 kalori itu berlaku untuk semua umur dan jenis kelamin serta memperkirakan kegiatan fisik, berat badan, dan perkiraan status fisiologi masyarakat. Ukuran tersebut adalah ukuran untuk meangukur garis kemiskinan, sehingga masyarakat yang memiliki

pendapatan yang dibawah rata-rata garis kemiskinan dapat dikatakan masuk dalam kondisi miskin.

### **2.2.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks pembangunan manusia merupakan alat yang digunakan untuk mengukur penilaian kualitas pembangunan manusia, dilihat dari kondisi fisik manusia (kesehatan dan kesejahteraan) maupun berdasarkan kondisi non fisik. Pembangunan dari kondisi fisik berdasarkan dari angka harapan hidup dan kemampuan daya beli, sedangkan pembangunan dari kondisi non fisik dapat dilihat dari kualitas pendidikan manusianya (susanti, 2013).

Menurut badan pusat statistik (BPS) indeks pembangunan manusia merupakan ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur pencapaian kualitas hidup pembangunan manusia. Ada beberapa komponen indeks pembangunan manusia yaitu: pencapaian umur panjang dan kesehatan, pencapaian dibidang pendidikan berupa angka melek huruf, rata-rata sekolah dan rata-rata lamanya sekolah dan kemampuan daya beli masyarakat yang dapat dilihat dari pengeluaran per kapita.

Komponen-komponen indeks pembangunan manusia yaitu:

#### **a. Harapan Hidup**

Umur panjang merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengukur kesehatan dan nutrisi. Umur panjang dapat diukur menggunakan angka harapan hidup (tahun) pada tingkat kelahiran. Mulai dihitung ketika

seorang bayi baru dilahirkan dalam satuan tahun dan mengalami tingkat kematian dari tiap kelompok umur (Hakim, 2002)

b. Pendidikan

Tingkat pendidikan dapat dihitung berdasarkan dua indikator, yaitu tingkat melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Angka melek huruf adalah masyarakat yang berusia 15 tahun keatas dan dapat membaca dan dapat menulis, sedangkan tingkat lama sekolah adalah tingkat yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun untuk dapat menempuh jenjang pendidikan formal.

c. Pendapatan

Untuk mengukur standar hidup dapat dilihat dari pendapatan perkapitanya. Pendapatan perkapita disesuaikan dengan tingkat daya beli mata uang disetiap Negara agar dapat mencerminkan standar hidup serta asumsi marginal yang turun dari pendapatan (Todaro, 2006)

Tujuan yang sangat penting IPM sebagai indeks pembangunan manusia:

- Menghitung dan membangun dasar indikator pembangunan manusia.
- Dapat memanfaatkan indikator agar dapat menjaga ukuran kesederhanaan.
- Dapat menciptakan indeks komposit dibandingkan dari menggunakan indeks dasar.
- Dapat membuat satu ukuran yang dapat mencakup aspek sosial dan ekonomi.

Konsep dari perserikatan bangsa-bangsa (PBB) tentang pembangua manusia, yang ditetapkan dengan peringkat kinerja pembangunan manusia, menetapkan peringkat kinerja pemabnguna manusia dilakukan di skala 0,0-100 dengan beberapa kategori yaitu:

- a. Tinggi : IPM lebih dari 80,0
- b. Menengah Atas : IPM antara 66,0 sampai 79,9
- c. Menengah Bawah : IPM antara 50,0 sampai 65,9
- d. Rendah : IPM dibawah 50,0

### **2.2.3 Pengangguran**

Pengangguran merupakan individu yang berada pada umur angkatan kerja dan sedang mecari pekerjaan dengan tingkat upah yang berlaku (Irawan dan Suparmoko,2002).

Pengangguran merupakan individu yang dikelompokkan dalam angkatan kerja aktif yang sedang mencari pekerjaan, tetapi tidak atau belum memperoleh pekerjaan (Sukirno,2006).

Jenis-jenis pengangguran adalah:

#### **1. Jenis Pengangguran Berdasarkan Cirinya:**

- a. Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka disebabkan oleh kurangnya kesempatan kerja dibandingkan dengan pertumbuhan tenaga kerja yang tersedia sehingga dapat menyebabkan terjadinya *open unemployment* atau pengangguran terbuka, akibatnya banyak tenaga kerja yang menganggur atau tidak mendapatkan pekerjaan.

b. Setengah Menganggur

Setengah menganggur atau *under employment* disebut juga sebagai tenaga kerja yang bekerja dibawah jam kerja normal. Jam kerja normal di Indonesia yaitu 35 jam per minggu, jadi orang yang bekerja dibawah 35 jam per minggu dimasukkan dalam kelompok setengah menganggur.

2. Jenis pengangguran berdasarkan penyebab:

a. Pengangguran Alamiah

Pengangguran alamiah ini disebabkan oleh kesempatan kerja yang penuh. Kesempatan kerja penuh yaitu ketika 95% angkatan kerja suatu waktu bekerja dan 5% inilah yang disebut dengan pengangguran alamiah.

b. Pengangguran Struktural

Pengangguran struktural ini disebabkan oleh perubahan dari pertumbuhan ekonomi. Tiga hal yang menjadi penyebab terjadinya pengangguran struktural adalah dalam kemajuan di bidang teknologi, kemunduran

persaingan produk lokal dengan produk yang ada di luar negeri, dan kemunduran perkembangan ekonomi dalam suatu kawasan.

c. Pengangguran Friksional

Pengangguran friksional disebabkan oleh tindakan dari pekerja yang meninggalkan pekerjaannya untuk mencari pekerjaan lainnya yang sesuai dengan kemauannya.

d. Pengangguran Konjungtural

Pengangguran konjungtur disebabkan oleh pengangguran alamiah yang berlebihan dan akibat dari pengurangan permintaan agregat. Pengurangan permintaan agregat akan menyebabkan berkurangnya pekerja, sehingga pengangguran konjungtural dapat muncul.

### 3. Jenis Pengangguran Berdasarkan Cirinya

a. Pengangguran Terbuka

Kurangnya kesempatan kerja dibandingkan dengan pertumbuhan tenaga kerja yang tersedia, akibatnya banyak tenaga kerja yang menganggur atau tidak mendapatkan pekerjaan disebut dengan pengangguran terbuka.

b. Setengah Menganggur

Setengah menganggur disebut juga sebagai tenaga kerja yang bekerja dibawah jam kerja normal. Jam kerja normal di Indonesia yaitu 35 jam per minggu, jadi tenaga kerja yang bekerja dibawa 35 jam per minggu dimasukkan dalam kelompok setengah menganggur.

c. Pengangguran Tersembunyi

Pengangguran tersembunyi merupakan keadaan dari tenaga kerja yang jumlahnya melebihi batas dari suatu jenis kegiatan ekonomi yang diperlukan.

d. Pengangguran Musiman

Pengangguran musiman merupakan pengangguran dalam masa satu tahun. Pengangguran ini terjadi disektor pertanian atau perkebunan. Petani akan menganggur saat menunggu musim panennya.

#### **2.2.4 Upah Minimum**

Upah minimum merupakan salah satu penerimaan berupa imbalan dari pengusaha kepada karyawan atas pekerjaan yang telah dilakukan dan diberikan dalam bentuk uang yang ditetapkan atas persetujuan undang-undang serta suatu perjanjian antara pengusaha dan karyawan termasuk tunjangan, untuk karyawan maupun

keluarganya. Jadi upah adalah imbalan yang diberikan pengusaha kepada seseorang atas usaha yang telah dikerjakan (Sumarsono 2003).

Berdasarkan peraturan yang dibuat Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999 tentang upah minimum merupakan upah bulanan yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan yang tetap. Tunjangan tetap adalah imbalan setiap bulan yang tidak terkait dengan kehadiran atau pencapaian prestasi.

Tujuan menetapkan upah minimum adalah untuk memenuhi standar hidup minimum seperti kesehatan, efisiensi dan kesejahteraan pekerja (Kaufman, 2000).

Upah minimum dibedakan menjadi dua yaitu:

- Upah minimum regional

Upah minimum regional adalah upah pokok dan tunjangan bagi pekerja tingkat paling rendah dan masa kerja kurang dari satu tahun yang berlaku di daerah tertentu.

- Upah minimum sektoral

Upah minimum sektoral adalah upah yang berlaku dalam satu Provinsi berdasarkan kemampuan setiap sektor.

### 2.3 Hubungan Antara Variabel

Dibagian ini akan dijelaskan tentang hubungan antar variabel (tingkat kemiskinan) dan variabel independen (Indeks pembangunan Manusia, Tingkat pengangguran dan Upah Minimum, yaitu:

1. Hubungan Antara Indeks Pembangunan Manusia Dengan Tingkat Kemiskinan

Indeks pembangunan manusia merupakan tujuan pembangunan di suatu Negara. Indeks pembangunan manusia memiliki peran penting di suatu Negara untuk menyerap kemampuan teknologi modern serta digunakan untuk menciptakan pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan (Todaro, 2002)

Konsep dari indeks pembangunan manusia bertujuan untuk memperluas pilihan manusia terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan kemampuan daya beli. Indeks pembangunan manusia sama dengan pembangunan kualitas manusia dan memiliki peran penting untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Ada beberapa aspek dari indeks pembangunan manusia yaitu, aspek mental, fisik dan intelegensia merupakan cara untuk bias lepas dari kemiskinan. Suatu daerah yang memiliki kualitas pembangunan manusia yang tinggi biasanya memiliki presentase kemiskinan yang rendah, sebaliknya jika suatu daerah memiliki kualitas pembangunan manusia yang rendah, daerah tersebut cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Sehingga dapat dikatakan indeks

pembangunan manusia memiliki peran penting untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

## 2. Hubungan Antara Pengangguran Dengan Tingkat Kemiskinan

Efek buruk yang disebabkan oleh pengangguran adalah kurangnya pendapatan masyarakat dan menyebabkan kurangnya tingkat kemakmuran yang telah dicapai masyarakat. Semakin berkurangnya kesejahteraan masyarakat akibat pengangguran dapat meningkatkan peluang masyarakat masuk kedalam kemiskinan karena memiliki pendapatan yang rendah (Sukirno, 2004).

Menurut teori lingkaran setan (nurske) yang menyebutkan kemiskinan disebabkan oleh rendahnya produktivitas. Dapat diartikan pengangguran disebabkan oleh rendahnya produktivitas seseorang. Karena pengangguran tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga tidak dapat menghasilkan upah atau gaji. Untuk dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari diperlukan upah atau gaji. Sehingga pengangguran memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Dengan kata lain jika tingkat pengangguran disuatu daerah meningkat maka dapat menyebabkan tingkat kemiskinan meningkat.

## 3. Hubungan Antara Upah Minimum Dengan Tingkat Kemiskinan

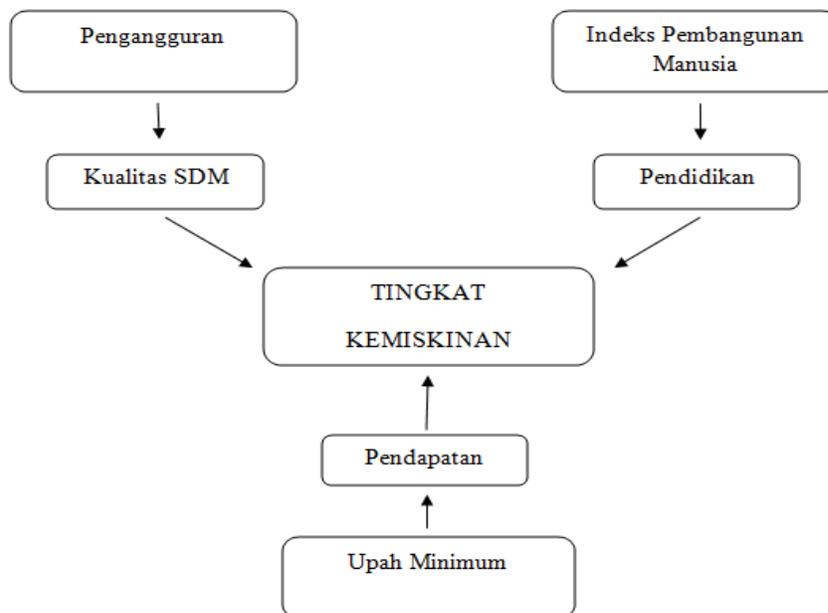
Tujuan untuk menetapkan upah minimum adalah agar dapat mencukupi standar hidup minimum yaitu kesehatan, efisiensi dan kesejahteraan kerja.

Upah minimum berguna untuk mengangkat derajat masyarakat yang

pendapatannya rendah. Semakin meningkat tingkat upah minimum, maka akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kesejahteraan juga meningkat dan dapat terbebas dari kemiskinan. Peran pekerja, pemerintah dan swasta diperlukan dalam menyikapi penetapan upah minimum untuk mencapai tujuan bersama yaitu pekerja atau buruh sejahtera, perusahaan atau swasta semakin berkembang dan lestari serta pemerintah dapat menjaga perkembangan dan peningkatan perekonomian dengan baik. Maka dari itu jika upah minimum meningkat dapat menyebabkan pendapatan masyarakat naik dan kesejahteraan masyarakat naik dan kemiskinan akan turun.

### Kerangka Pikir

Gambar 2.1



## 2.4 Hipotesis

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan terdahulu dan rumusan masalah yang ada maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- a. Diduga indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.
- b. Diduga pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.
- c. Diduga upah minimum berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Cara Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data sekunder yang digunakan adalah data panel yang menggunakan gabungan dari deret waktu (*time series*) dari tahun 2011-2016 dan detet lintang (*cross section*) sebanyak 26 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 17 kabupaten dan 9 kota dan berhasil menghasilkan 156 observasi. Provinsi Jawa Barat sendiri sebetulnya memiliki 18 kabupaten, akan tetapi untuk kabupaten Pangandaran dihilangkan dalam observasi ini dikarenakan Pangandaran baru berdiri pada tahun 2012, sedangkan penelitian ini mengambil periode waktu 2011 hingga 2012. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah variabel independen (Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran dan Upah Minimum) berpengaruh terhadap variabel dependen (Tingkat Kemiskinan). Guna melakukan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi determinan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2016 dan data yang diperoleh merupakan data literature yang berkaitan berupa, dokumen, artikel, catatan, arsip dan bacaan ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian.

### **3.2 Definisi Operasional Variabel**

Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai variabel dependen adalah Tingkat Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran dan Upah Minimum digunakan sebagai variabel independen.

#### **3.2.1 Variabel Dependen (Y)**

Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan adalah rendahnya pendapatan yang diperoleh masyarakat dan jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup di masing-masing Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Barat (dalam satuan ribu jiwa).

#### **3.2.2 Variabel Independen (X)**

##### **a. Indeks Pembangunan Manusia (X1)**

Indeks pembangunan manusia (IPM) adalah indeks komposit dari gabungan empat indikator yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lamanya sekolah dan pengeluaran per kapita di Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Barat (satuan persen)

b. Pengangguran (X2)

Pengangguran adalah jumlah penduduk yang tidak mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan di Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Barat ( satuan jiwa).

c. Upah Minimum (X3)

Upah minimum yang telah ditentukan pemerintah disetiap Kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat

### 3.3 Metode Analisis

Metode analisis data didalam penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif. Untuk mengolah data dalam penelitian ini menggunakan analisis dan kuantitatif, yang bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen. Metode yang digunakan adalah Metode Regresi Data Panel.

$$TK = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon_{it}$$

Dimana:

TK = Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2016 (ribu jiwa)

$i$  = Kabupaten atau Kota Provinsi Jawa Barat

$t$  = Waktu atau Tahun (2011-2016)

IPM ( $X_1$ ) = Jumlah Indeks Pembangunan Manusia dengan metode baru yang telah diterbitkan oleh badan pusat statistic Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Barat (Satuan %)

TPT ( $X_2$ ) = Jumlah Pengangguran terbuka penduduk yang berumur 15 tahun keatas menurut Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Barat (satuan ribu jiwa)

UMK ( $X_3$ ) = Jumlah Upah Minimum Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan oleh Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Barat (satuan rupiah)

$\beta_0$  = Konstan

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$  = Koefisien regresi berganda

$\epsilon_{it}$  = Variabel Pengganggu

$\epsilon$  = Error Term

### 3.4 Estimasi Model Regresi Data Panel

Analisis regresi data panel didefinisikan sebagai penggabungan data *cross section* dan *time series*. Penggunaan data panel dapat memberikan ketersediaan jumlah data yang dianalisis serta memberikan jumlah data yang

banyak hingga dapat memenuhi persyaratan dan sifat-sifat statistik dengan beberapa pilihan estimasi (Sriyana 2014)

## 1. Metode Estimasi Data Panel

### a. *Common effect model*

Metode pendekatan *common effect* menganggap bahwa intersep dan slope tetap berhubungan baik antar individu maupun antar waktu. Dapat diasumsikan adanya perbedaan intersep dan slope akan dijelaskan oleh variabel pengganggu (*error* atau *residual*). (Sriyati, 2014)

Model *common effect* dapat dikatakan sebagai model paling sederhana karena hanya menggabungkan antara data *time series* dan data *cross section* kedalam data panel (*pool sata*). Dari hasil data tersebut kemudian dapat diregresi dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS).

### b. *Fixed effect model*

Model ini dapat diasumsikan bahwa obyek observasi maupun koefisien regresi (*slope*) tetap besar dari waktu ke waktu. Dalam estimasi *fixed effect* dilakukan dengan menggunakan *dummy* sesuai dengan definisi dan kriterian dimasing-masing asumsi. *Least Square Dummy variables* (LSDV) yang sering disebut dalam Model estimasi ini. Dengan persamaan regresi data panel:

$$TK = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon_{it}$$

Dimana:

TK	= Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)
$i$	= Kabupaten atau Kota Provinsi Jawa Barat
$t$	= Waktu atau Tahun (2011-2016)
IPM ( $X_1$ )	= Jumlah Indeks Pembangunan Manusia (Satuan %)
TPT ( $X_2$ )	= Jumlah Pengangguran terbuka (satuan ribu jiwa)
UMK ( $X_3$ )	= Jumlah Upah Minimum Provinsi (satuan rupiah)
$\beta_0$	= Konstanta
$\beta_1 \beta_2 \beta_3$	= Koefisien regresi berganda
$\varepsilon_{it}$	= Variabel Pengganggu
$\varepsilon$	= Error Term

Pendekatan *fixed effect* ini memiliki kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian model terhadap keadaan yang sesungguhnya. Sehingga

diperlukan model yang dapat menunjukkan perbedaan dengan intersep yang mengasumsikan adanya perbedaan antar objek maupun antar waktu (Sriyana 2014).

c. *Random effect model*

Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan intersep dan konstanta dapat disebabkan oleh residual atau error sebagai akibat perbedaan antar unit dan periode waktu yang terjadi secara *random*. Model estimasi ini disebut dengan *Error Component Model* (ECM). Dijelaskan oleh (Sriyana, 2014)

## 2. Pemilihan Model

Tujuan memilih model estimasi adalah untuk memilih model yang tepat, terdapat beberapa pengujian yang dilakukan, yaitu:

### 1. Uji Chow

Uji chow adalah pengujian untuk menentukan model *Common effect* atau *fixed effect* yang tepat untuk digunakan dalam mengestimasi data panel. Hipotesis dalam uji chow adalah :

- $H_0$  : Dapat digunakan untuk memilih model *Common effect* atau *pooled OLS* jika nilai probabilitas F statistiknya tidak signifikan pada  $\alpha$  0,05%.

- $H_1$  : Dapat digunakan untuk memilih model *fixed effect*, jika nilai probabilitas F statistiknya signifikan pada  $\alpha$  0,05%.

Hipotesis yang digunakan harus memiliki intersep dengan nilai yang sama. Jika nilai probabilitas F statistic  $>$  dari F tabel maka akan menyebabkan  $H_0$  ditolak, berarti model yang tepat untuk digunakan adalah model *fixed effect*, dan begitu juga sebaliknya (Sriyana, 2014).

## 2. Uji Hausman

Uji Hausman dapat digunakan sebagai pengujian statistik dalam memilih apakah model *fixed effect* atau *random effect* yang sangat tepat digunakan. Pengujian uji Hausman dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

- $H_0$  : Memilih model *Random Effect*, jika nilai *chi-square* tidak signifikan pada  $\alpha$  0,05%
- $H_1$  : Memilih model *Fixed effect*, jika nilai *chi-square* signifikan terhadap  $\alpha$  0,05%

Jika nilai statistik hausman (nilai W-hitung)  $<$  dari nilai kritis *chi-square* atau *p value*  $>$  dibandingkan  $\alpha$  maka yang tepat digunakan adalah model *random effect* (Sriyana, 2014).

### 3. Pengujian Hipotesis

Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji koefisien Determinan ( $R^2$ ), Uji Koefisien Regresi bersama-sama (Uji F) dan Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t).

#### a. Uji Koefisien Determinan ( $R^2$ )

Dijelaskan oleh Sriyana (2014) bahwa koefisien detrminan dilakukan untuk mengetahui seberapa baik didalam analisis, yang ditunjukkan oleh nilai  $R^2$  dalam bentuk presentase. Besarnya  $R^2$  berasal dari proporsi variabel dependen yang dijelaskan menggunakan model dan sisanya tidak dijelaskan menggunakan model. Semakin tinggi nilai  $R^2$  maka hubungan variabel independen dengan variabel dependen semakin kuat.

#### b. Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji F)

Pengujian variabel dependen terhadap variabel independen secara sendiri dapat diuji serentak dengan Uji F. untuk menguji koefisien regresi secara bersamaan perlu dilakukan dengan membuat hipotesis :

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$$

$$H_1 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq 0$$

Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  (kritis) maka akan menolak  $H_0$  namun jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  (kritis) maka akan menerima  $H_0$  (Sriyana 2014).

**c. Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)**

Uji t dapat digunakan untuk menyusun hipotesis statistik, untuk menentukan derajat kesalahan ( $\alpha$ ), menentukan t kritis dan keputusan hipotesis. Nilai t tabel didapatkan dengan  $\alpha = 0,05\%$  dan df. Jika nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima atau menolak  $H_1$ , jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_1$  (Sriyana 2014).

## BAB IV

### ANALISIS DAN PEMBAHASAN

**Tabel 4.1**

**Laju Pertumbuhan Penduduk (%) Migrasi dan Kelahiran di 5 Kabupaten Provinsi Jawa Barat**

Kabupaten Provinsi Jawa Barat	Laju Pertumbuhan (%)
Bogor	4,25
Cianjur	-0,26
Bandung	2,97
Garut	0,86
Cirebon	-0,81

Sumber: (Badan Pusat Statistik) Tahun 2015, Diolah

Menurut tabel 4.1 laju pertumbuhan penduduk migrasi dan kelahiran di 5 kabupaten Provinsi Jawa Barat, laju pertumbuhan tertinggi pertama berada di Bogor sebesar 4,25 persen, laju pertumbuhan tertinggi kedua berada di Bandung sebesar 2,97 persen, laju pertumbuhan tertinggi ketiga berada di Garut sebesar 0,86 persen. Laju pertumbuhan tertinggi keempat adalah Cianjur sebesar -0,26 persen dan yang kelima adalah Cirebon sebesar -0,81 yang merupakan daerah terendah dalam tingkat laju pertumbuhan penduduk (BPS, 2015). Tabel 4.1 akan menjelaskan hubungannya dengan gambar peta 4.1 mengenai analisis kewilayahan pada sub bab 4.2.

Pada analisis dan pembahasan ini menguraikan hasil penelitian mengenai indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka serta upah minimum kabupaten atau kota terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2016. Dalam penelitian ini analisis dilakukan pada sejumlah data *cross section* dan *time series* dengan menggunakan 26 sampel dari kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat pada periode tahun 2011-2016. Analisis data panel dilakukan dengan pemilihan metode yang tepat dalam menganalisis data hasil penelitian, metode yang digunakan adalah *common effect*, *fixed effect* dan *random effect*. Diantara ketiga metode tersebut akan dipilih salah satu yang akan digunakan untuk tahap uji statistik. Pengujian estimasi ini akan dibantu dengan program *EViews 8*.

#### **4.1 Deskripsi Data**

Dalam analisis ini dapat menggambarkan data hasil penelitian yang berhubungan dengan penggunaan variabel penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat. Data tersebut adalah tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka serta upah minimum kabupaten atau kota. Berikut adalah hasil deskriptif dari data variabel penelitian:

**Tabel 4.2**  
**Statistik Deskriptif**

Variabel	Tingkat kemiskinan (ribu jiwa)	Indeks pembangunan manusia(persen)	Tingkat pengangguran terbuka (ribu jiwa)	Upah minimum (rupiah)
Mean	170,58	68,31846154	80546	1521861
Maximum	494,60	78,88	474108	2253400
Minimum	13,38	61,36	5815	987622
Std. Dev	111,1845898	5,152357	88566,92	430127,80
Observations	27	27	27	27

Sumber : Hasil pengolahan data sekunder, 2017

#### **4.2 Analisis Kewilayahan**

Berdasarkan analisis kewilayahan spasial kemiskinan lebih berpusat pada daerah Kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kota Bandung yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat, namun kantong kemiskinan juga terdapat pada Kabupaten-Kabupaten tersebut. Berikut ini adalah gambar peta Provinsi Jawa Barat:



Gambar 4.1 Peta Provinsi Jawa Barat dan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2016

Keterangan :

- Sangat Miskin
- Miskin Menengah
- Miskin

Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa) di Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Barat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu:

1. Sangat miskin (250-500 ribu jiwa) ditunjukkan dengan warna Merah Muda:

- Bogor : 490,80 ribu jiwa
- Cianjur : 261, 39 ribu jiwa
- Bandung : 272,65 ribu jiwa
- Garut : 298, 5 ribu jiwa
- Cirebon : 288,49 ribu jiwa

2. Miskin menengah (100-250 ribu jiwa) ditunjukkan dengan warna Kuning :

- Sukabumi : 188,68 ribu jiwa
- Tasikmalaya : 195,61 ribu jiwa
- Kuningan : 144,07 ribu jiwa
- Majalengka : 152,50 ribu jiwa
- Sumedang : 120,60 ribu jiwa
- Indramayu : 237 ribu jiwa
- Subang : 170,37 ribu jiwa
- Karawang : 230,60 ribu jiwa
- Bekasi : 164,41 ribu jiwa
- Bandung Barat : 192,48 ribu jiwa
- Kota Bandung : 107,58 ribu jiwa
- Kota Bekasi : 140,03 ribu jiwa
- Kota Tasikmalaya : 102,79 ribu jiwa

3. Miskin (1 – 100 ribu jiwa) ditunjukkan dengan warna Hijau :

- Ciamis : 98,77 ribu jiwa

- Purwakarta : 83,55 ribu jiwa
- Pangandaran : 40,14 ribu jiwa
- Kota Bogor : 77, 28 ribu jiwa
- Kota Sukabumi : 27,51 ribu jiwa
- Kota Cirebon : 30,15 ribu jiwa
- Kota Depok : 50,56 ribu jiwa
- Kota Cimahi : 35,07 ribu jiwa
- Kota Banjar : 12,74 ribu jiwa

Penduduk dalam golongan sangat miskin terbagi menjadi lima Kabupaten yaitu Bogor, Cianjur, Bandung, Garut dan Cirebon, sedangkan golongan penduduk miskin menengah terbagi menjadi sepuluh Kabupaten dan tiga Kota yaitu Sukabumi, Tasikmalaya, Kuningan, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang, Karawang, Bekasi, Bandung Barat, Kota Bandung, Kota Bekasi dan Kota Tasikmalaya, dan golongan penduduk yang miskin saja terbagi menjadi tiga Kabupaten dan enam Kota yaitu Ciamis, Purwakarta, Pangandaran, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Banjar.

Berdasarkan gambar 4.1 dan tabel 4.1 Provinsi Jawa Barat yang merupakan golongan dalam jumlah penduduk sangat miskin (250-500 ribu jiwa), pertama Bogor dengan tingkat kemiskinan sebesar 490,80 ribu jiwa dan laju pertumbuhan sebesar 4,25 persen dengan penyebab kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Bogor 31,08% berasal dari jenis pekerjaan pertanian tanaman pangan. Selain itu kemiskinan yang

bersumber dari jenis pekerjaan usaha pertanian adalah 42,85%. (Titin, 2015). Kedua, Cianjur dengan tingkat kemiskinan sebesar 261,39 ribu jiwa dan laju pertumbuhan sebesar -0,26 persen kemiskinan disebabkan oleh semakin banyaknya industri sehingga semakin banyak menyerap tenaga kerja. Selain itu semakin meluasnya sektor perdagangan juga menjadi salah satu indikasi penyebab kemiskinan. (Pikiran Rakyat, 2014). Ketiga, Bandung dengan tingkat kemiskinan sebesar 272,65 ribu jiwa dan laju pertumbuhan sebesar 2,97 persen yang menjadi penyebab kemiskinan dikarenakan bertambahnya jumlah penduduk, yang membawa persoalan baru, mengingat daya serap tenaga kerja sangat minim, sementara jumlah angkatan kerja setiap tahun meningkat. Tanpa memiliki daya saing tinggi dan SDM yang berkualitas, mereka terpaksa menjadi pengangguran sehingga disebut sebagai penduduk miskin (Bandungkab, 2015). Keempat, Garut dengan tingkat kemiskinan sebesar 298,5 ribu jiwa dan laju pertumbuhan sebesar 0,86 persen yang disebabkan oleh penerima kartu Jamkesmas yang mengalami peningkatan menjadi sebanyak 1.137.000 pada tahun 2013, sedangkan tahun sebelumnya sebesar 822.923. Hal ini di indikasi karena adanya penambahan jumlah penduduk (Sapa, 2013). Kelima, Cirebon yang memiliki tingkat kemiskinan sebesar 288,49 ribu jiwa dan laju pertumbuhan sebesar -0,81 persen. Kemiskinan disebabkan oleh sebagian besar penduduk Kabupaten Cirebon yang mempunyai mata pencaharian utama sebagai petani. Pertanian di kabupaten Cirebon kurang mendapat perhatian dari pemerintah setempat. Selain itu pertambangan ikan juga menjadi sumber pendapatan kedua

penduduk kabupaten Cirebon, akan tetapi pertambahan ikan di kabupaten Cirebon terbatas dikarenakan faktor cuaca yang tidak menentu. Dari segi sumber daya manusia mempunyai kualitas yang rendah disebabkan tingkat pendidikan yang rendah, banyak penduduk kabupaten Cirebon yang memilih untuk bekerja atau menikah daripada menempuh pendidikan (Iqbal, 2018).

### **4.3 Analisis Regresi**

#### **4.3.1 Pemilihan Model**

##### **4.3.1.1 Uji Chow**

Uji *chow* digunakan untuk memilih antara model *fixed effect* atau *common effect*

$H_0$  : Memilih model *Common Effect*, jika nilai probabilitas F statistiknya tidak signifikan pada  $\alpha$  0,05%

$H_1$  : Memilih Model *Fixed Effect*, jika nilai probabilitas F statistiknya signifikan pada  $\alpha$  0,05%

Berdasarkan hasil pengujian uji *Chow* dengan *Redundant Test*, mendapatkan nilai probabilitas *Cross-section* F sebesar 0.0000. dikarenakan semua model pengujian memiliki nilai probabilitas *Cross section* F lebih kecil dari  $\alpha$  0,05 ( $0.0000 < 0,05$ ) maka  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_1$ . Maka model yang cocok digunakan adalah model *Fixed Effect*. Dari hasil pengujian diatas, ditentukan apakah akan

menggunakan model *Fixed Effect* atau *common effect*. Untuk melakukan perhitungan model *random effect* yang dibandingkan dengan *fixed effect* akan dilakukan dengan uji *Hausman test*.

#### **4.3.1.2 Uji Hausman**

Untuk memilih model yang terbaik antara *fixed effect* atau *random effect* dapat menggunakan uji *hausman*.

$H_0$  : Memilih model *random effect*, jika *Chi square*nya tidak signifikan dengan  $\alpha$  0,05%

$H_1$  : Memilih model *fixed effect*, jika *Chi square*nya signifikan dengan  $\alpha$  0,05%

Berdasarkan hasil uji Hausman didapatkan nilai probabilitas *chi square* sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari  $\alpha$  0,05 ( $0,0000 < 0,05$ ), maka  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_1$ . Maka model yang sangat tepat digunakan adalah model *fixed effect*. Berdasarkan uji hausman model yang sangat tepat untuk menganalisis kemiskinan di Provinsi Jawa Barat adalah model *fixed effect* dibandingkan dengan model *random effect*.

### 4.3.2 Model Regresi Panel Fixed Effect

**Tabel 4.3**

**Model Fixed Effect**

Dependent Variable: Y?  
 Method: Pooled Least Squares  
 Date: 04/01/18 Time: 00:27  
 Sample: 2011 2016  
 Included observations: 6  
 Cross-sections included: 26  
 Total pool (balanced) observations: 156

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2275.880	482.6904	4.714988	0.0000
LOG(X1?)	-511.6105	131.6915	-3.884916	0.0002
LOG(X2?)	0.203020	3.961308	0.051251	0.9592
LOG(X3?)	3.600009	6.397641	0.562709	0.5746

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.992106	Mean dependent var	169.3320
Adjusted R-squared	0.990366	S.D. dependent var	109.8728
S.E. of regression	10.78424	Akaike info criterion	7.760174
Sum squared resid	14770.07	Schwarz criterion	8.327134
Log likelihood	-576.2936	Hannan-Quinn criter.	7.990449
F-statistic	570.0770	Durbin-Watson stat	1.801253
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Hasil Pengolahan *Eviews 8*

Model regresi *fixed effect* pada tingkat kemiskinan:

$$TK = \beta_0 + \beta_1 X_1 + X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon_{it}$$

$$TK = 2275.880 - 511.6105 IPM + 0.203020 TPT + 3.600009 UMK + \varepsilon_{it}$$

Dimana :

TK = Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)

$i$  = Kabupaten atau Kota Provinsi Jawa Barat

$t$  = Waktu atau Tahun(2011-2016)

IPM ( $X_1$ ) = Jumlah Indeks Pembangunan Manusia (Satuan %)

TPT ( $X_2$ ) = Jumlah Pengangguran terbuka (satuan ribu jiwa)

UMK ( $X_3$ ) = Jumlah Upah Minimum Provinsi (satuan rupiah)

$\beta_0$  = Konstan

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$  = Koefisien regresi berganda

$\varepsilon_{it}$  = Variabel Pengganggu

$\varepsilon$  = *Error Term*

### 4.3.3 Pengujian Hipotesis

#### 4.3.3.1 $R^2$ (Koefisien Determinan)

Untuk mengukur seberapa besar variasi variabel dependen dijelaskan dengan menggunakan variabel independen dapat menggunakan Koefisien determinan ( $R^2$ ).

Dalam penelitian ini dijelaskan dengan menggunakan variabel dependen yaitu Tingkat Kemiskinan (Y) dan variable independen yaitu indeks pembangunan manusia (X1), tingkat pengangguran terbuka (X2) dan upah minimum kabupaten kota (X3). Pada model estimasi *fixed effect*,  $R^2$  sebesar 0.992106 sehingga variasi variabel tingkat kemiskinan dapat dijelaskan dengan indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, dan upah minimum sebesar 99,21% serta sisanya 0,79% dijelaskan oleh variabel diluar model.

#### **4.3.3.2 Uji F**

Uji statistic F dapat menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependen. Hasil uji F dapat ditunjukkan pada model *fixed effect*. Hasil perhitungan pada *fixed effect*, diperoleh dari nilai probabilitas F sebesar 0.000000 yang lebih kecil dari  $\alpha$  0,05 ( $0.000000 < 0,05$ ), maka dapat dinyatakan bahwa indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka dan upah minimum provinsi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

#### **4.3.3.3 Uji t**

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Hasil uji t ditunjukkan pada table model *fixed effect*. Uji hipotesis ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel indeks pembangunan manusia

tingkat pengangguran terbuka dan upah minimum kabupaten atau kota terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.

### **1. Pengaruh Indeks Pembangunan manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan**

Hasil perhitungan pada model *fixed effect*, variabel indeks pembangunan manusia memiliki nilai koefisien regresi sebesar -511.6105 dan memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0000 lebih kecil dari pada  $\alpha$  0,05 ( $0.0000 < 0,05$ ), maka dapat dinyatakan indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Maka hipotesis pertama yang menyatakan indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat dapat diterima atau terbukti.

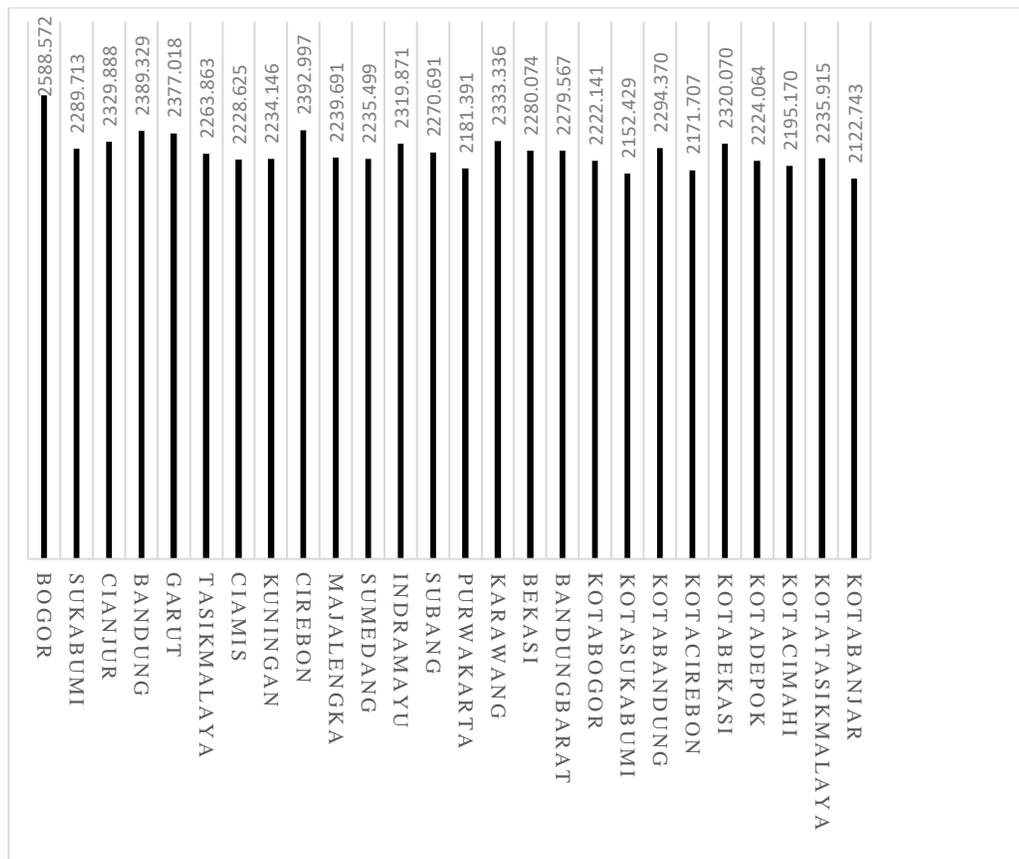
### **2. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan**

Hasil perhitungan pada model *fixed effect*, variabel tingkat pengangguran memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.203020 dan memiliki nilai probabilitas sebesar 0.9592 lebih besar dari pada  $\alpha$  0,05 ( $0.9592 > 0,05$ ), maka dapat dinyatakan pengangguran tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Maka hipotesis kedua yang menyatakan pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat dapat diterima.

### 3. Pengaruh Upah Minimum Terhadap Tingkat Kemiskinan

Hasil perhitungan pada *fixed effect*, variabel upah minimum memiliki nilai koefisien regresi sebesar 3.600009 dan memiliki nilai probabilitas sebesar 0.5746 lebih besar dari pada  $\alpha 0,05$  ( $0.5746 > 0,05$ ), maka dapat dinyatakan upah minimum tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Maka hipotesis ketiga yang menyatakan upah minimum berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tidak dapat diterima.

#### 4.4 Interpretasi Hasil Persamaan Regresi



#### **Grafik 4.1 Hasil Konstanta Berdasarkan Estimasi *Fixed Effect***

Dalam menginterpretasikan hasil regresi data panel menggunakan model *fixed effect*. Dilihat dari wilayah Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat berbeda disetiap Kabupaten/Kota. Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan tertinggi terdapat pada Kabupaten Bogor yaitu sebesar 2,588,572 kemudian kemiskinan tertinggi setelah Kabupaten Bogor adalah Kabupaten Cirebon sebesar 2,392,997 dan tingkat kemiskinan terendah berada di Kota Banjar sebesar 2,122,743.

#### **4.5 Pembahasan**

##### **1. Indeks Pembangunan Manusia**

Dalam hasil penelitian ini indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Barat, hal ini sesuai dengan hasil hipotesis yang sudah dijelaskan sebelumnya. Hasil perhitungan dapat diketahui bahwa variabel indeks pembangunan manusia memiliki nilai koefisien negatif sebesar 511.6105, artinya setiap kenaikan 1% maka akan menyebabkan tingkat kemiskinan menurun sebesar 511.6105 ribu jiwa.

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh model yang digunakan dalam menguji hipotesis menggunakan model *fixed effect*. Dari hasil pengujian *fixed effect* dapat disimpulkan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut dapat

menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai indeks pembangunan manusia akan menyebabkan tingkat kemiskinan menurun. Peningkatan indeks pembangunan manusia seperti meningkatkan keahlian serta pendidikan yang tinggi akan membuka peluang dalam mendapatkan pekerjaan atau upah yang layak sehingga akan menyebabkan tingkat kemiskinan menurun. Peningkatan sumber daya manusia akan memberikan pengaruh terhadap nilai pengurangan kemiskinan yang terjadi. Hal tersebut sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Zuhdiyaty (2017) yang menyimpulkan bahwa indeks pembangunan manusia terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Pratama (2014) yang menyimpulkan bahwa indeks pembangunan manusia serta penelitian yang dilakukan oleh Putri (2013) yang menyimpulkan bahwa indeks pembangunan manusia juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

## **2. Pengangguran**

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengangguran tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa variabel pengangguran memiliki koefisien sebesar 0.203020, yang artinya setiap kenaikan 1 ribu jiwa pengangguran tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan sebesar 0.203020 ribu jiwa.

Selanjutnya didapatkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh positif dan tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kenaikan jumlah pengangguran akan menyebabkan pendapatan masyarakat menurun sehingga akan mengurangi tingkat kemakmuran yang yang dicapai masyarakat. Orang-orang yang menganggur belum tentu mempunyai pendapatan yang rendah dan orang yang menganggur tidak selamanya termasuk dalam golongan rakyat miskin selama mereka mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kemiskinan tidak selalu berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan (Godfrey, 1993). Selain itu juga diperkuat oleh Arsyad (1997) yang mengatakan bahwa salah jika beranggapan setiap orang yang tidak bekerja adalah miskin, sedangkan yang bekerja secara penuh adalah orang kaya. Hal ini terjadi karena terkadang ada pekerja yang berada di perkotaan tidak bekerja secara sukarela karena masih mencari pekerjaan yang lebih baik dan sesuai dengan tingkat pendidikannya. Mereka menolak pekerjaan yang dirasa lebih rendah karena mereka mempunyai kemampuan lain atau kemampuan yang berbeda sehingga dapat membantu masalah keuangan mereka.

Dengan demikian dapat dikatakan kondisi pengangguran tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan pada Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zuhdiyaty (2017) yang mengatakan bahwa pengangguran tidak berpengaruh

terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan penelitian yang dilakukan Wahyudi dan Tri (2013) menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan, artinya jika jumlah pengangguran naik maka tingkat kemiskinan juga akan naik. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Puspita (2015) menunjukkan hasil bahwa pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan.

### **3. Upah Minimum Kabupaten**

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa upah minimum kabupaten tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis yang sudah jelas sebelumnya. Dalam perhitungan menunjukkan bahwa variabel upah minimum kabupaten memiliki koefisien bernilai 3.600009, yang artinya setiap kenaikan upah minimum kabupaten 1 rupiah tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan sebesar 3.600009 ribu jiwa.

Kemudian untuk variabel upah minimum kabupaten menunjukkan bahwa variabel upah minimum tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, yang berarti bahwa kenaikan upah tidak akan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Sehingga walaupun upah minimum meningkat atau menurun tidak akan menyebabkan tingkat kemiskinan naik ataupun menurun. Hal ini disebabkan oleh upah minimum yang memiliki nilai upah yang tinggi pada setiap Kabupaten atau Kota yang berada di Jawa Barat di bandingkan dengan Provinsi tetangga seperti Provinsi Jawa Timur,

Provinsi Jawa Tengah. Berikut adalah perbandingan daftar Upah Minimum Provinsi Jawa Barat dan Provinsi tetangga:

<b>Provinsi Jawa Barat 2016</b>	<b>Rp 1.312.355</b>
Provinsi Jawa Timur 2016	Rp 1.273.490
Provinsi Jawa Tengah 2016	Rp 1.265.000

Sumber : (Kabar Buruh) Tahun 2017, Diolah

Pada tahun 2016 Upah Minimum Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 1.312.355 lebih besar dari Upah Minimum Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 1.273.490 dan Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 1.265.000. Upah yang mempunyai nilai tinggi ini dikarenakan daya serap tenaga kerja yang juga tinggi. Provinsi Jawa Barat memiliki lapangan kerja yang cukup luas, dari pariwisatanya masing-masing Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat memiliki potensi yang sangat besar dan berkembang, sehingga tidak mengherankan jika upah yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat juga tinggi. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Ni Nyoman (2013) yang menunjukkan hasil bahwa upah minimum berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Dan selanjutnya penelitian yang dibuat oleh Andini (2017) yang menyebutkan bahwa upah minimum berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN IMPLIKASI**

#### **5.1 Simpulan**

Dari hasil analisis pengaruh dari variabel yang meliputi: indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka dan upah minimum terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2016 dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, maka hipotesis pertama dapat diterima atau terbukti
2. Pengangguran berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, maka hipotesis kedua tidak dapat diterima atau tidak terbukti
3. Upah Minimum berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, maka hipotesis ketiga tidak dapat diterima atau tidak terbukti

#### **5.2 Implikasi**

1. Indeks pembangunan manusia harusnya diperhatikan dengan benar oleh pemerintah, pemerintah harus meningkatkan berbagai fasilitas

yang sudah ada untuk kegiatan ekonomi terutama fasilitas sosial yang membantu kehidupan masyarakat seperti sekolah dengan fasilitas yang memadai, fasilitas kesehatan yang memadai dan memberikan pelatihan keterampilan bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan kualitas masyarakat.

2. Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif pada tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, pemerintah harus melakukan kebijakan dengan melakukan pemberdayaan masyarakat dan memperluas kesempatan kerja, seperti memberikan sosialisasi atau pelatihan tata cara usaha agar masyarakat bisa membuka usaha sendiri dan menyediakan lapangan pekerjaan agar dapat mengatasi tingkat kemiskinan.
3. Upah Minimum Kabupaten atau Kota seharusnya ditetapkan dengan melihat kondisi wilayah Kabupaten atau Kota, agar tidak mengakibatkan keuntungan kepada tenaga kerja saja atau pun keuntungan pengusaha namun juga dapat memberikan keuntungan untuk bersama. Jika upah minimum terlalu rendah maka akan menyebabkan berkurangnya kesejahteraan tenaga kerja sehingga tenaga kerja tidak bisa mendapatkan kepuasan yang tinggi, sebaliknya juga upah minimum terlalu tinggi akan menyebabkan kerugian pada pengusaha dikarenakan upah minimum yang tinggi.

## LAMPIRAN I

### Data Variabel Independen dan Variabel Dependen

<b>Jawa Barat</b>	<b>Tahun</b>	<b>TK (Ribuan Jiwa)</b>	<b>IPM (Persen)</b>	<b>TPT (Ribuan Jiwa)</b>	<b>UMK (Rupiah)</b>
Bogor	2011	470,5	64,78	222638	1172060
Bogor	2012	541,0	65,66	198949	1269320
Bogor	2013	499,1	66,74	182128	2042000
Bogor	2014	479,1	67,36	1777222	2242240
Bogor	2015	487,10	67,77	231854	2590000
Bogor	2016	490,80	67,77	231854	2960325
Sukabumi	2011	246,1	61,14	96834	850000
Sukabumi	2012	234,6	62,27	103443	885000
Sukabumi	2013	222,8	63,63	109416	1201020
Sukabumi	2014	213,6	64,07	88421	1565922
Sukabumi	2015	217,86	64,44	101972	1940000
Sukabumi	2016	188,66	64,44	101972	2195435
Cianjur	2011	306,6	59,38	97500	810500
Cianjur	2012	292,2	60,28	114146	876500
Cianjur	2013	267,9	61,68	145532	970000
Cianjur	2014	256,6	62,08	153407	1500000
Cianjur	2015	273,90	62,42	96574	1600000
Cianjur	2016	261,39	62,42	96574	1837520
Bandung	2011	292,2	67,78	145164	1123000
Bandung	2012	279,5	68,13	173575	1223800
Bandung	2013	271,7	68,58	158494	1388333
Bandung	2014	266,8	69,06	138045	1738476
Bandung	2015	281,04	70,05	60368	2001195
Bandung	2016	272,65	70,05	60368	2275715
Garut	2011	330,9	60,55	88372	802000
Garut	2012	315,8	61,04	63813	880000
Garut	2013	320,9	61,67	81722	965000
Garut	2014	315,6	62,23	78818	1085000
Garut	2015	325,67	63,21	65761	1250000

Garut	2016	298,5	63,21	65761	1421625
Tasikmalaya	2011	211,6	61,05	61203	860000
Tasikmalaya	2012	201,5	61,69	41774	946000
Tasikmalaya	2013	199,3	62,40	53820	1035000
Tasikmalaya	2014	194,8	62,79	58588	1279329
Tasikmalaya	2015	208,12	63,17	67375	1435000
Tasikmalaya	2016	195,61	63,17	67375	1632360
Ciamis	2011	156,3	65,48	63021	741800
Ciamis	2012	147,8	66,29	41766	793750
Ciamis	2013	133,0	67,20	44938	854075
Ciamis	2014	130,0	67,64	37755	1040928
Ciamis	2015	104,87	68,02	37137	1131862
Ciamis	2016	98,77	68,02	37137	1363319
Kuningan	2011	150,3	63,04	42156	749000
Kuningan	2012	142,3	65,60	34608	805000
Kuningan	2013	139,4	66,16	39814	857000
Kuningan	2014	133,6	66,63	32118	1002000
Kuningan	2015	147,21	67,19	35290	1206000
Kuningan	2016	144,07	67,19	35290	1364760
Cirebon	2011	328,6	64,17	93866	906190
Cirebon	2012	311,3	64,48	145634	956650
Cirebon	2013	307,2	65,06	133553	1081300
Cirebon	2014	300,5	65,53	121695	1212750
Cirebon	2015	313,21	66,07	95559	1400000
Cirebon	2016	288,49	66,07	95559	1592220
Majalengka	2011	178,6	62,67	41443	763000
Majalengka	2012	168,6	63,13	40057	800000
Majalengka	2013	164,9	63,71	43631	850000
Majalengka	2014	158,0	64,07	28116	1000000
Majalengka	2015	167,50	64,75	24240	1245000
Majalengka	2016	152,50	64,75	24240	1409360
Sumedang	2011	139,4	66,16	39955	1110130
Sumedang	2012	132,9	67,36	39106	1007500
Sumedang	2013	127,4	68,47	33138	1381700
Sumedang	2014	122,0	68,76	41883	1735473
Sumedang	2015	129,03	69,29	47592	2001195

Sumedang	2016	120,60	69,29	47592	2275715
Indramayu	2011	272,1	61,47	79018	944190
Indramayu	2012	257,3	62,09	61549	994864
Indramayu	2013	251,1	62,98	76501	1125000
Indramayu	2014	240,7	63,55	61403	1276320
Indramayu	2015	253,12	64,36	62998	1465000
Indramayu	2016	237,00	64,36	62998	1665810
Subang	2011	195,5	64,21	62456	791200
Subang	2012	185,4	64,86	60437	862500
Subang	2013	185,4	65,48	52004	1220000
Subang	2014	177,9	65,8	49193	1577956
Subang	2015	187,17	66,52	70682	1900000
Subang	2016	170,37	66,52	70682	2149720
Purwakarta	2011	89,0	65,51	35657	961200
Purwakarta	2012	85,0	66,3	38354	1047500
Purwakarta	2013	83,6	67,09	37598	1639167
Purwakarta	2014	80,3	67,32	31905	2100000
Purwakarta	2015	83,94	67,84	41299	2600000
Purwakarta	2016	83,55	67,84	41299	2927990
Karawang	2011	256,7	65,21	98420	1159000
Karawang	2012	245,1	65,97	116365	1269227
Karawang	2013	238,6	66,61	96586	2000000
Karawang	2014	229,0	67,08	114004	2447450
Karawang	2015	235,03	67,66	113693	2957450
Karawang	2016	230,60	67,66	113693	3330505
Bekasi	2011	159,5	68,66	123029	1286421
Bekasi	2012	153,1	69,38	93375	1491866
Bekasi	2013	157,7	70,09	97922	2002000
Bekasi	2014	156,6	70,51	94436	2447445
Bekasi	2015	169,20	71,19	149859	2840000
Bekasi	2016	164,41	71,19	149859	3261375
Bandung Barat	2011	219,8	62,36	61868	1175959
Bandung Barat	2012	209,9	63,17	65557	1236991
Bandung Barat	2013	206,0	63,93	63266	1396399
Bandung Barat	2014	197,9	64,27	51971	1738476
Bandung Barat	2015	205,69	65,23	62679	2004637

Bandung Barat	2016	192,48	65,23	62679	2280175
Kota Bogor	2011	88,9	71,72	44985	1079100
Kota Bogor	2012	84,8	72,25	39417	1174200
Kota Bogor	2013	83,3	72,86	43856	2002000
Kota Bogor	2014	80,1	73,10	43503	2352350
Kota Bogor	2015	79,15	73,65	49942	2658155
Kota Bogor	2016	77,28	73,65	49942	3022765
Kota sukabumi	2011	27,3	68,67	13461	860000
Kota sukabumi	2012	26,0	69,74	14381	890000
Kota sukabumi	2013	25,2	70,81	14888	1050000
Kota sukabumi	2014	24,1	71,19	16083	1350000
Kota sukabumi	2015	27,84	71,84	13319	1572000
Kota sukabumi	2016	27,51	71,84	13319	1834175
Kota Bandung	2011	116,9	78,13	116798	1188435
Kota Bandung	2012	111,4	78,3	107384	1271625
Kota Bandung	2013	117,7	78,55	130052	1538703
Kota Bandung	2014	115	78,98	95971	2000000
Kota Bandung	2015	114,12	79,67	107532	2310000
Kota Bandung	2016	107,58	79,67	107532	2626940
Kota Cirebon	2011	35	71,49	14280	923000
Kota Cirebon	2012	33,2	71,97	16656	980000
Kota Cirebon	2013	31,9	72,27	12811	1082500
Kota Cirebon	2014	30,6	72,93	16221	1226500
Kota Cirebon	2015	31,74	73,34	16125	1415000
Kota Cirebon	2016	30,15	73,34	16125	1608945
Kota Bekasi	2011	145,9	77,48	116290	1275000
Kota Bekasi	2012	139,8	77,71	93676	1422252
Kota Bekasi	2013	137,8	78,63	111702	2100000
Kota Bekasi	2014	139,7	78,84	115643	2441954
Kota Bekasi	2015	146,94	79,63	111736	2954031
Kota Bekasi	2016	140,03	79,63	111736	3327160
Kota Depok	2011	48,9	76,96	86387	1243552
Kota Depok	2012	47	77,28	78089	1424797
Kota Depok	2013	45,9	78,27	69702	2042000
Kota Depok	2014	47,5	78,58	80903	2397000
Kota Depok	2015	49,97	79,11	72521	2705000

Kota Depok	2016	50,56	79,11	72521	3046180
Kota Cimahi	2011	39,5	74,41	25996	1172485
Kota Cimahi	2012	37,7	74,99	21149	1224442
Kota Cimahi	2013	32,3	75,85	29856	1388333
Kota Cimahi	2014	31,8	76,06	26006	1735473
Kota Cimahi	2015	34,09	76,42	25434	2001200
Kota Cimahi	2016	35,07	76,42	25434	2275715
Kota Tasikmalaya	2011	192,8	67,18	25525	865000
Kota Tasikmalaya	2012	123	67,84	20749	950000
Kota Tasikmalaya	2013	112,2	68,63	20174	1045000
Kota Tasikmalaya	2014	104,6	69,04	15571	1237000
Kota Tasikmalaya	2015	106,78	69,99	17407	1435000
Kota Tasikmalaya	2016	102,79	69,99	17407	1641280
Kota Banjar	2011	14,7	67,15	5520	732000
Kota Banjar	2012	13,9	67,53	5067	780000
Kota Banjar	2013	12,8	68,01	5563	950000
Kota Banjar	2014	12,7	68,34	6315	1025000
Kota Banjar	2015	13,42	69,31	6212	1168000
Kota Banjar	2016	12,74	69,31	6212	1327965

## LAMPIRAN II

### Rata-Rata Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Barat

<b>JAWA BARAT</b>	<b>TK (Ribu Jiwa)</b>	<b>IPM (Persen)</b>	<b>TPT (Jiwa)</b>	<b>UMK (Rupiah)</b>
BOGOR	494,60	66,68	474108	2045991
SUKABUMI	220,60	63,33	100343	1439563
CIANJUR	276,43	61,38	117289	1265753
BANDUNG	277,32	68,94	122669	1625087
GARUT	317,90	61,99	74041	1067271
TASIKMALAYA	201,82	62,38	58356	1197948
CIAMIS	106,79	67,11	43626	987622
KUNINGAN	142,81	65,97	36546	997293
CIREBON	308,22	65,23	114311	1191518
MAJALENGKA	165,02	63,85	33621	1011227
SUMEDANG	182,56	68,22	41544	1585286
INDRAMAYU	251,89	63,14	67411	1245197
SUBANG	183,62	65,57	60909	1416896
PURWAKARTA	84,23	66,98	37685	1879310
KARAWANG	239,17	66,7	108794	2193939
BEKASI	160,09	70,17	118080	2221518
BANDUNGBARAT	205,30	64,03	61337	1638773
KOTABOGOR	82,26	72,87	45274	2048095
KOTASUKABUMI	26,33	70,68	14242	1259363
KOTABANDUNG	113,78	78,88	110878	1822617
KOTACIREBON	32,10	72,56	15370	1205991
KOTABEKASI	141,70	78,65	110131	2253400
KOTADEPOK	48,31	78,22	76687	2143088
KOTACIMAHI	35,08	75,69	25646	1632941
KOTATASIKMALAYA	123,70	68,78	19472	1195547
KOTABANJAR	13,38	68,28	5815	997161

**LAMPIRAN III****INTERCEPT**

<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>KOEFISIEN PER KABUPATEN</b>	<b>KOEFISIEN C</b>	<b>INTERCEPT</b>
BOGOR	312,6919	2275,880	2588,572
SUKABUMI	13,83313	2275,880	2289,713
CIANJUR	54,00812	2275,880	2329,888
BANDUNG	113,4487	2275,880	2389,329
GARUT	101,1382	2275,880	2377,018
TASIKMALAYA	-12,01735	2275,880	2263,863
CIAMIS	-47,25479	2275,880	2228,625
KUNINGAN	-41,73407	2275,880	2234,146
CIREBON	117,117	2275,880	2392,997
MAJALENGKA	-36,18898	2275,880	2239,691
SUMEDANG	-40,38068	2275,880	2235,499
INDRAMAYU	43,99067	2275,880	2319,871
SUBANG	-5,188865	2275,880	2270,691
PURWAKARTA	-94,48889	2275,880	2181,391
KARAWANG	57,45564	2275,880	2333,336
BEKASI	4,193731	2275,880	2280,074
BANDUNGBARAT	3,686726	2275,880	2279,567
KOTABOGOR	-53,73854	2275,880	2222,141
KOTASUKABUMI	-123,4511	2275,880	2152,429
KOTABANDUNG	18,48999	2275,880	2294,370
KOTACIREBON	-104,1733	2275,880	2171,707
KOTABEKASI	44,19017	2275,880	2320,070
KOTADEPOK	-51,81625	2275,880	2224,064
KOTACIMAHI	-80,70955	2275,880	2195,170
KOTATASIKMALAYA	-39,96464	2275,880	2235,915
KOTABANJAR	-153,1369	2275,880	2122,743

**LAMPIRAN IV**  
**COMMON EFFECT**

Dependent Variable: Y?  
 Method: Pooled Least Squares  
 Date: 07/16/18 Time: 03:10  
 Sample: 2011 2016  
 Included observations: 6  
 Cross-sections included: 26  
 Total pool (balanced) observations: 156

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2273.494	251.7993	9.028991	0.0000
LOG(X1?)	-737.0483	68.48113	-10.76279	0.0000
LOG(X2?)	86.52206	5.423071	15.95444	0.0000
LOG(X3?)	4.535366	13.56436	0.334359	0.7386
R-squared	0.778729	Mean dependent var		169.3320
Adjusted R-squared	0.774362	S.D. dependent var		109.8728
S.E. of regression	52.19105	Akaike info criterion		10.77301
Sum squared resid	414033.7	Schwarz criterion		10.85121
Log likelihood	-836.2945	Hannan-Quinn criter.		10.80477
F-statistic	178.3139	Durbin-Watson stat		0.387584
Prob(F-statistic)	0.000000			

**LAMPIRAN V**  
**FIXED EFFECT**

Dependent Variable: Y?  
Method: Pooled Least Squares  
Date: 04/01/18 Time: 00:27  
Sample: 2011 2016  
Included observations: 6  
Cross-sections included: 26  
Total pool (balanced) observations: 156

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2275.880	482.6904	4.714988	0.0000
LOG(X1?)	-511.6105	131.6915	-3.884916	0.0002
LOG(X2?)	0.203020	3.961308	0.051251	0.9592
LOG(X3?)	3.600009	6.397641	0.562709	0.5746
Fixed Effects (Cross)				
_BOGOR--C	312.6919			
_SUKABUMI--C	13.83313			
_CIANJUR--C	54.00812			
_BANDUNG--C	113.4487			
_GARUT--C	101.1382			
_TASIKMALAYA--C	-12.01735			
_CIAMIS--C	-47.25479			
_KUNINGAN--C	-41.73407			
_CIREBON--C	117.1170			
_MAJALENGKA--C	-36.18898			
_SUMEDANG--C	-40.38068			
_INDRAMAYU--C	43.99067			
_SUBANG--C	-5.188865			
_PURWAKARTA--C	-94.48889			
_KARAWANG--C	57.45564			
_BEKASI--C	4.193731			
_BANDUNGBARAT--C	3.686726			
_KOTABOGOR--C	-53.73854			
_KOTASUKABUMI--C	-123.4511			
_KOTABANDUNG--C	18.48999			
_KOTACIREBON--C	-104.1733			
_KOTABEKASI--C	44.19017			
_KOTADEPOK--C	-51.81625			
_KOTACIMAHI--C	-80.70955			
_KOTATASIKMALAYA--C				
C	-39.96464			
_KOTABANJAR--C	-153.1369			
Effects Specification				

Cross-section fixed (dummy variables)

---

R-squared	0.992106	Mean dependent var	169.3320
Adjusted R-squared	0.990366	S.D. dependent var	109.8728
S.E. of regression	10.78424	Akaike info criterion	7.760174
Sum squared resid	14770.07	Schwarz criterion	8.327134
Log likelihood	-576.2936	Hannan-Quinn criter.	7.990449
F-statistic	570.0770	Durbin-Watson stat	1.801253
Prob(F-statistic)	0.000000		

---

**LAMPIRAN VI**  
**RANDOM EFFECT**

Dependent Variable: Y?  
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)  
Date: 04/01/18 Time: 00:28  
Sample: 2011 2016  
Included observations: 6  
Cross-sections included: 26  
Total pool (balanced) observations: 156  
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2836.560	360.7675	7.862571	0.0000
LOG(X1?)	-698.1302	97.70106	-7.145574	0.0000
LOG(X2?)	9.362072	3.754771	2.493380	0.0137
LOG(X3?)	12.56252	5.190829	2.420138	0.0167
Random Effects (Cross)				
_BOGOR--C	287.7089			
_SUKABUMI--C	-5.049977			
_CIANJUR--C	28.75787			
_BANDUNG--C	107.0877			
_GARUT--C	82.66373			
_TASIKMALAYA--C	-27.16945			
_CIAMIS--C	-44.21870			
_KUNINGAN--C	-40.54106			
_CIREBON--C	103.1210			
_MAJALENGKA--C	-40.15176			
_SUMEDANG--C	-38.04446			
_INDRAMAYU--C	28.84168			
_SUBANG--C	-12.71356			
_PURWAKARTA--C	-95.38826			
_KARAWANG--C	43.44431			
_BEKASI--C	-0.884332			
_BANDUNGBARAT--C	-10.05362			
_KOTABOGOR--C	-41.92409			
_KOTASUKABUMI--C	-102.1973			
_KOTABANDUNG--C	37.05385			
_KOTACIREBON--C	-78.68979			
_KOTABEKASI--C	60.30750			
_KOTADEPOK--C	-32.30373			
_KOTACIMAHI--C	-54.82720			
_KOTATASIKMALAYA--C				
C	-26.83980			
_KOTABANJAR--C	-127.9894			

Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	49.06761	0.9539
Idiosyncratic random	10.78424	0.0461

Weighted Statistics

R-squared	0.323194	Mean dependent var	15.13271
Adjusted R-squared	0.309836	S.D. dependent var	15.21717
S.E. of regression	12.64183	Sum squared resid	24292.03
F-statistic	24.19477	Durbin-Watson stat	1.262935
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.416189	Mean dependent var	169.3320
Sum squared resid	1092407.	Durbin-Watson stat	0.028084

## LAMPIRAN VII

### UJI CHOW

Redundant Fixed Effects Tests

Pool: PANEL

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	137.322264	(25,127)	0.0000
Cross-section Chi-square	520.001763	25	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: Y?

Method: Panel Least Squares

Date: 04/01/18 Time: 00:29

Sample: 2011 2016

Included observations: 6

Cross-sections included: 26

Total pool (balanced) observations: 156

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2273.494	251.7993	9.028991	0.0000
LOG(X1?)	-737.0483	68.48113	-10.76279	0.0000
LOG(X2?)	86.52206	5.423071	15.95444	0.0000
LOG(X3?)	4.535366	13.56436	0.334359	0.7386
R-squared	0.778729	Mean dependent var		169.3320
Adjusted R-squared	0.774362	S.D. dependent var		109.8728
S.E. of regression	52.19105	Akaike info criterion		10.77301
Sum squared resid	414033.7	Schwarz criterion		10.85121
Log likelihood	-836.2945	Hannan-Quinn criter.		10.80477
F-statistic	178.3139	Durbin-Watson stat		0.387584
Prob(F-statistic)	0.000000			

## LAMPIRAN VIII

### UJI HAUSMAN

Correlated Random Effects - Hausman Test

Pool: PANEL

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	59.874260	3	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
LOG(X1?)	-511.610489	-698.130191	7797.156055	0.0347
LOG(X2?)	0.203020	9.362072	1.593653	0.0000
LOG(X3?)	3.600009	12.562523	13.985113	0.0165

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: Y?

Method: Panel Least Squares

Date: 04/01/18 Time: 00:29

Sample: 2011 2016

Included observations: 6

Cross-sections included: 26

Total pool (balanced) observations: 156

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2275.880	482.6904	4.714988	0.0000
LOG(X1?)	-511.6105	131.6915	-3.884916	0.0002
LOG(X2?)	0.203020	3.961308	0.051251	0.9592
LOG(X3?)	3.600009	6.397641	0.562709	0.5746

#### Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.992106	Mean dependent var	169.3320
Adjusted R-squared	0.990366	S.D. dependent var	109.8728
S.E. of regression	10.78424	Akaike info criterion	7.760174
Sum squared resid	14770.07	Schwarz criterion	8.327134
Log likelihood	-576.2936	Hannan-Quinn criter.	7.990449
F-statistic	570.0770	Durbin-Watson stat	1.801253

Prob(F-statistic)            0.000000

---

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, F. (2012). *Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) Periode 2011-2010*. Econosains
- Astrini, N. M. (2013). *Pengaruh PDRB, Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali*. Ilmu Ekonomi
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2002-2016*. Diambil 30 Maret 2018, dari <http://www.jabar.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota Tahun 2010-2015*. Diambil 30 Maret 2018, dari <http://www.jabar.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota Tahun 2010-2015*. Diambil 30 Maret 2018, dari <http://www.jabar.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Presentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat (Persen), 2002-2016*. Diambil 30 Maret 2018, dari <http://www.jabar.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Presentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi, 2007-2011*. Diambil dari 30 Maret 2018, dari <http://www.jatim.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Presentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi, 2012-2017*. Diambil dari 30 Maret 2018, dari <http://www.jatim.bps.go.id>
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. (2014). *Rakor TKPKD Provinsi Jawa Barat*. Diambil dari 30 Maret 2018, dari <http://www.bappeda.jabarprov.go.id>
- Badan Pusat Statistik. *Jawa Barat Dalam Angka Berbagai Tahun Terbitan, Jawa Barat*. Diambil dari 30 Maret 2018, dari <http://www.jabar.bps.go.id>
- Buruh Indonesia. *Upah Minimum Kabupaten/Kota Berbagai Tahun, Jawa Barat*. Diambil 30 Maret 2018, dari <https://mantanburuh.wordpress.com>
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Laju Pertumbuhan Penduduk di Jawa Barat Menurut Kabupaten/Kota, 2005-2013*. Diambil 10 April 2018, dari <http://www.jabar.bps.go.id>

- Dores, Edi. (2014). *Pengaruh Angka Melek Huruf dan Angka Harapan Hidup Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sumatra Barat*. Journal of Economics and Economic Education. Vol. 2 No 2. Hal. 126-133
- Fahmi, A. (2015). *Faktor Pendidikan dan Kesehatan Berpengaruh Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jambi*. Jurnal Development
- Kabupaten Bandung. (2015). *Lima Tahun, Angka Kemiskinan dan Pengangguran Menurun*. Diambil 10 April 2018, dari <http://www.bandungkab.go.id>
- Mustika, Candra. (2011). *Pengaruh PDB dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode 1990-2008*. Jurnal Paradigma Ekonomika. Vol.1 No. 4
- Nirwana, I. D. (2013). *Pengaruh Variabel Pendidikan Terhadap Presentase Penduduk Miskin (Studi pada 33 Provinsi di Indonesia, 6 Provinsi di Pulau Jawa, dan 27 Provinsi di Luar Pulau Jawa pada Tahun (2006-2011))*. Ilmu Ekonomi
- Pikiran Rakyat. (2014). *Angka Kemiskinan di Cianjur Turun*. Diambil 10 April 2018, dari <http://www.pikiran-rakyat.com>
- Pratama, Yoghi Citra. (2014). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia*. Jurnal Bisnis dan Manajemen. Vol. 4.No. 2. Hal.210-223
- Puspita, Dita Wahyuni. (2015). *Analisis Determinan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah*. Journal of Economics and Policy. Vol 8.No. 1.Hal. 100-107
- Putri dan Nyi Nyoman. (2013). *Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali*. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol.2 No. 10 Hal 441-448
- Sapa Indonesia. (2013). *Data Kemiskinan di Kabupaten Garut, Hingga Kini Masih Simping Siur, Bahkan Sangat Membingungkan*. Diambil 10 April 2018, dari <http://www.sapa.or.id>
- Suhartini, Titin. (2015). *Proporsi Kemiskinan di Kabupaten Bogor*. SosioInforma. Vol. 01 No. 02
- Sukmaraga, Prima (2011). *Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB Perkapita, dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah*. Skripsi Sarjana (Tidak Dipublikasikan) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro. Semarang

- Suliswanto, Muhammad Sri Wahyudi. (2010). *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Angka Kemiskinan di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol. 8 No.2 Desember 2010
- Sumarsono, Sonny. (2003). *Ekonomi Manajemen Sumberdaya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Susanti, S. (2013). *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Jawa Barat dengan Menggunakan Analisis Data Panel*. Jurnal Matematika Integratif
- Wahyudi dan Tri Wahyu.(2013). *Analisis Kemiskinan di Jawa Tengah*. Journal of Economics.Vol 2.No. 1. Hal 1-15
- Wirawan, I. T. (2015). *Analisis Pengaruh Pendidikan, PDRB PerKapita, dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali*. Ekonomi Pembangunan.
- Zuhdiyaty, Noor. (2017). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir (Studi Kasus Pada 33 Provinsi)*. Jurnal JIBEKA.Vol 11. No. Hal 27-31